



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



2
0
2
6

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Notomudigdo No. 5 Kendal 51313, Telepon (0294) 381498 Faksimile (0294) 381498
Laman inspektorat.kendalkab.go.id, Pos-el inspektorat@kendalkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor : 06/...³³⁸...../SPn/Insp

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kendal, 17 Maret 2026

Plt. Inspektur Daerah
Kabupaten Kendal

RINI UTAMI, SH. MA

Pembina Tk. I

NIP. 19700506 199603 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kendal Tahun 2025. LKjIP Kabupaten Kendal disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara perencanaan, kinerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan, dan berguna untuk mengukur kinerja yang dilakukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu juga dapat dijadikan tolok ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan. Perumusan target kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renja yang mengacu pada target yang ditetapkan dalam Renstra dan Rencana Implementasi Perda No.7 Tahun 2021 Tentang RPJMD 2021-2026, serta Perda No.2 Tahun 2025 Tentang RPJMD 2025-2029.

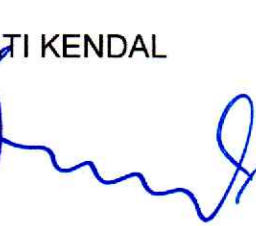
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini merupakan Laporan Kinerja tahun terakhir dalam periode RPJMD 2021-2026 dan transisi tahun pertama RPJMD 2025-2029, yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang Kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal, sekaligus dijadikan sebagai sarana untuk memaparkan secara obyektif capaian program dan kegiatan dengan rumusan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (*Renstra*).

Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat di dalamnya yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, implementasi, dan pengawasannya.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan menjadi dokumen pertanggungjawaban yang akuntabel, atas perbaikan kinerja berkelanjutan, serta wujud transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Kendal Tahun 2025.

Kendal, Maret 2026

 
DYAH KARTIKA PERMANASARI, SE.,MM.

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Kendal	2
C. Arah Kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2025	9
Bab II Perencanaan Kinerja	12
A. Rencana Strategis 2021 - 2026	12
B. Indikator Kinerja Utama 2021 – 2026	15
C. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	16
D. Rencana Anggaran Tahun 2025	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
A.1. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya	32
A.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target RPJMD	34
A.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya Berbanding Hasil	36
A.4. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja	46
A.5. Analisa Permasalahan dan Rekomendasi	62
B. Realiasi Anggaran	75
Bab IV Penutup	80
Lampiran	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam hal penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah, Bupati menyusun laporan kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban atas perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian, LKjIP Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini merupakan media pertanggungjawaban kemajuan penyelenggaraan pemerintah yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku, serta sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja terwujudnya *Good Governance*.

Isu Strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Pemulihan kondisi sosial dan perekonomian Kabupaten Kendal;
2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan pelayanan dasar;
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal dan merata dalam Era Industri 4.0;

4. Konektivitas antar wilayah yang belum optimal, ketahanan bencana dan kualitas lingkungan yang belum optimal;
5. Belum Optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, *Smartcity*, dan inovasi daerah;
6. Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa belum menuju Pencapaian Indeks Desa Membangun;
7. Munculnya Pandemi *COVID 19*; dan
8. Penanggulangan Kemiskinan.

Sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Kendal pada Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “*Kendal Smart City*” dengan Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 diprioritaskan pada **“Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City”**. Prioritas Tahun 2025 adalah peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *Clean* dan *Good Governance*, penguatan Smart City yang difokuskan pada *Smart Government*, *Smart Education*, *Smart Health*, *Smart Economy*, dan *Smart Transportation*.

Focus smart transportation adalah pada peningkatan kualitas transportasi umum seperti penyediaan *Bus Rapid Transit* (BRT) yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa, dengan pengelolaan berbasis teknologi informasi.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemangku kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sejalan dengan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

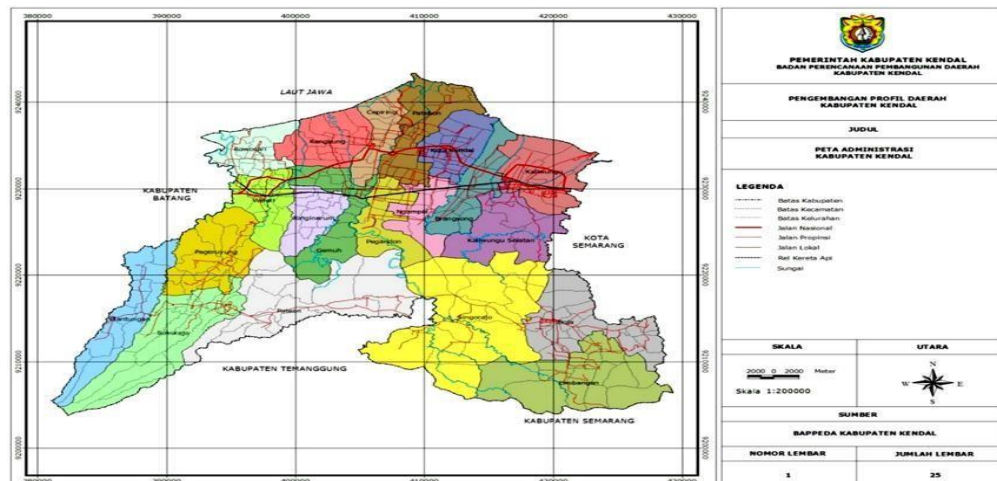
B. Gambaran Umum Kabupaten Kendal

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kendal masuk dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu kabupaten yang terletak di jalur utama

Pantai Utara Pulau Jawa atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pantura, memiliki luas wilayah 1.002,23 Km². Posisi Kabupaten Kendal berada di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Kendal



(Sumber : BPS Kendal Tahun 2025)

Jumlah Kecamatan di Kabupaten Kendal sebanyak 20 Kecamatan. Jumlah seluruh desa dan kelurahan adalah 286 yang terdiri dari 266 Desa dan 20 Kelurahan. Pembagian luas dan wilayah administrasi Kabupaten Kendal adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Kendal Tahun 2025

NO.	KECAMATAN	LUAS (km ²)
1	2	3
1.	Plantungan	48,82
2.	Sukorejo	76,04
3.	Pageruyung	51,44
4.	Patean	92,93
5.	Singorojo	119,32
6.	Limbangan	71,71
7.	Boja	64,11
8.	Kaliwungu	47,72

NO.	KECAMATAN	LUAS (km ²)
9.	Kaliwungu Selatan	65,19
10.	Brangsong	34,54
11.	Pegandon	31,13
12.	Ngampel	33,88
13.	Gemuh	51,43
14.	Ringinarum	23,50
15.	Weleri	30,29
16.	Rowosari	32,60
17.	Kangkung	38,99
18.	Cepiring	30,07
19.	Patebon	44,31
20.	Kendal	27,50

(Sumber : BPS Kendal Tahun 2025)

2. Letak dan Geografis

Kabupaten Kendal terletak pada 109,40° – 110,18° Bujur Timur dan 6,32° – 7,24° Lintang Selatan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kendal sebagai berikut :

Utara : Laut Jawa

Timur : Kota Semarang

Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung

Barat : Kabupaten Batang

Jarak terjauh wilayah Kabupaten Kendal dari Barat ke Timur adalah sejauh 40 Km, sedangkan dari Utara ke Selatan adalah sejauh 36 Km.

3. Topografi

Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu daerah pegunungan yang terletak di bagian selatan dengan ketinggian sampai dengan 2.579 mdpl. Daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s.d 10 mdpl. Kecamatan Plantungan merupakan kecamatan dalam wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 697 mdpl. Begitu pula dengan Kecamatan Sukorejo dengan ketinggian 524 mdpl. Sedangkan Kecamatan Kaliwungu adalah Kecamatan yang memiliki ketinggian terendah dengan ketinggian 4 mdpl.

4. Demografis

Data kependudukan baik dari sisi jumlah, jenis, komposisi, persebaran, serta perubahannya berguna untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tentang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, maupun bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya seperti infrastruktur, perumahan, pangan, pasar, pertokoan, maupun keperluan sekunder lainnya.

Dalam kaitannya dengan aspek perencanaan, data kependudukan akan digunakan untuk menentukan adanya kekuatan, kelemahan, maupun strategi untuk memecahkan masalah yang mungkin akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan. Data kependudukan Kabupaten Kendal selengkapnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

NO.	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Plantungan	17.764	16.991	34.755
2.	Pageruyung	19.891	19.174	39.065
3.	Sukorejo	33.295	32.028	65.323
4.	Patean	28.676	28.156	56.832
5.	Singorojo	28.873	28.412	57.285
6.	Limbangan	19.042	18.950	37.992
7.	Boja	44.914	44.494	89.408
8.	Kaliwungu	34.973	34.613	69.586
9.	Brangsong	27.410	27.103	54.513
10.	Pegandon	20.589	20.454	41.043
11.	Gemuh	28.128	27.774	55.902
12.	Weleri	32.234	31.704	63.938
13.	Cepiring	28.000	28.309	56.309
14.	Patebon	32.434	32.273	64.707
15.	Kendal	31.289	31.296	62.585
16.	Rowosari	28.796	28.220	57.016
17.	Kangkung	26.933	26.771	53.704

NO.	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
18.	Ringinarum	20.320	19.980	40.300
19.	Ngampel	19.466	19.284	38.750
20.	Kaliwungu Selatan	27.598	27.064	54.662

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal Tahun 2025)

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2025

PENDUDUK	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	524.397	537.626	544.962	551.157	550.625
Perempuan	514.466	531.969	539.192	543.057	543.050
Jumlah	1.038.863	1.069.595	1.084.154	1.094.214	1.093.675

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal Tahun 2025)

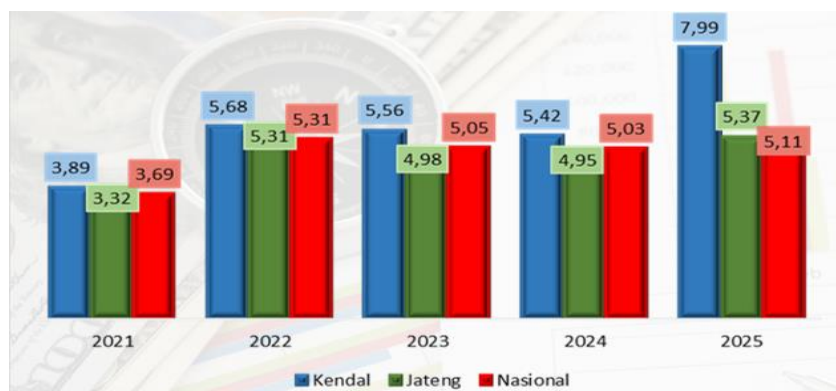
5. Capaian Indikator Makro

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal berdasarkan indikator makro sebagai berikut :

- Capaian pembangunan manusia pada tahun 2025 yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,07, meningkat dari tahun 2024 sebesar 74,34, dan meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 73,86;
- Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025 sebesar 7,99 meningkat dari capaian tahun 2024 yang sebesar 5,42;

Grafik 1.1

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025



(Sumber: Bapperida Kendal Tahun 2026)

- c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2025 mencapai Rp.60,002 juta, meningkat dari tahun 2024 yang mencapai Rp.55,26 juta;
- d) Penduduk miskin tahun 2025 sebesar 8,40% dapat diturunkan dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024 sebesar 9,35% dan pada tahun 2023 sebesar 9,39%;
- e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat diturunkan dari tahun 2023 sebesar 5,76%, dapat diturunkan pada tahun 2024 menjadi sebesar 5,01%, dan pada tahun 2025 dapat diturunkan menjadi 4,60%.

6. Gambaran Umum Organisasi

a) Kedudukan Pemerintah Kabupaten Kendal

Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa kedudukan Pemerintah Kabupaten Kendal adalah sebagai Daerah Otonom. Kedudukan yang berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b) Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Kendal

Pemerintah Kabupaten Kendal dipimpin oleh Bupati dibantu Wakil Bupati dan Perangkat Daerah. Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, yang terdiri dari :

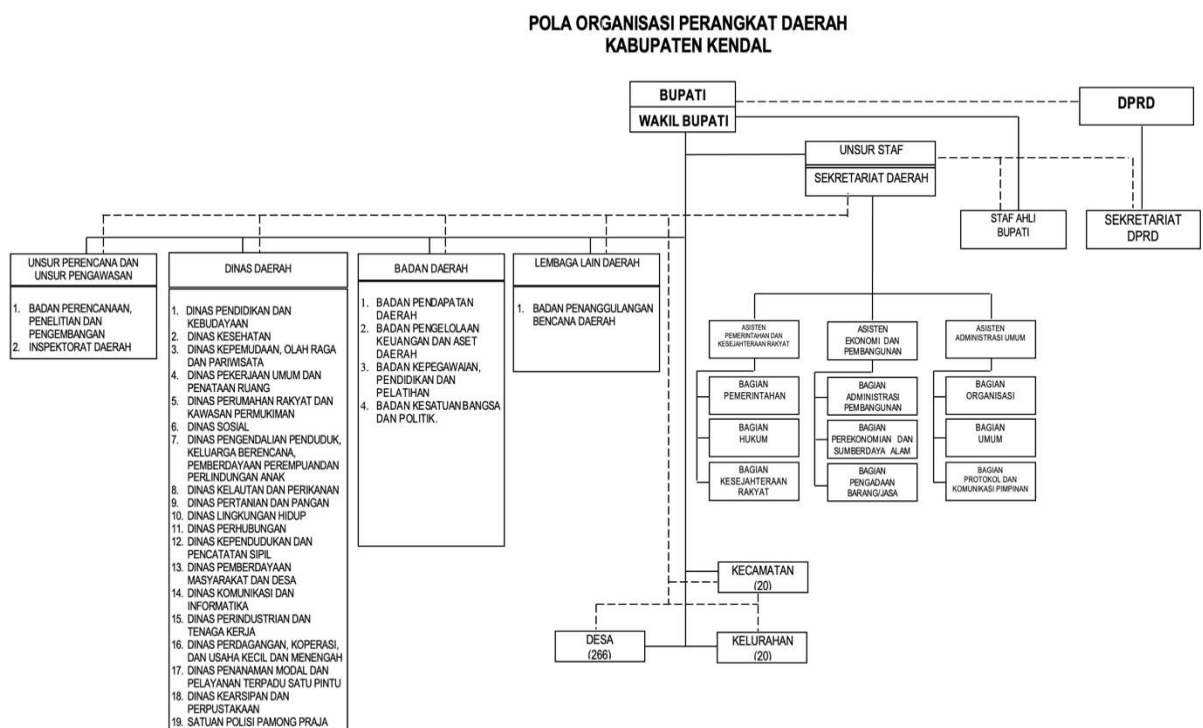
1) Sekretariat Daerah

- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Inspektorat Daerah
- 4) Badan Daerah
- 5) Dinas Daerah
- 6) Kecamatan

Adapun secara lengkap struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal tersaji pada bagan sebagai berikut:

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016



(Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025)

c) Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki 12.837 Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari :

- 1) Pegawai Negeri Sipil sebanyak 6.513 orang.
- 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 5.217 orang.
- 3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 1.107 orang.

Berdasarkan data SIMPEG dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang diolah oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal pada bulan Desember 2025, bahwa jumlah berdasarkan jenis kelamin, untuk ASN berjenis kelamin laki – laki sejumlah 5.361 orang dan ASN berjenis kelamin perempuan sejumlah 7.476 orang.

Kemudian ASN ditinjau dari jabatannya, terdiri dari JPT Pratama sejumlah 27 orang, Administrator 138 orang, Pengawas 229 orang dan Fungsional - Pelaksana 12.443 orang.

C. Arah Kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2025

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 diprioritaskan pada **“Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal *Smart City*”**. Prioritas tahun 2025 adalah peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *Clean* dan *Good Governance*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government*, *Smart Education*, *Smart Health*, *Smart Economy* dan *Smart Transportation*.

Focus smart transportation adalah pada peningkatan kualitas transportasi umum seperti penyediaan *Bus Rapid Transit* (BRT) yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa, dengan pengelolaan berbasis teknologi informasi.

Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan Kabupaten Kendal tahun 2025, berikut disajikan tabel program prioritas tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Arah Kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2025 Dan Program Prioritas

NO	PRIORITAS TAHUN	FOKUS PEMBANGUNAN	UNSUR	PROGRAM	URUSAN
1.	“Kendal Smart City” Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City	Peningkatan kemantapan Kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan <i>clean</i> dan <i>Good Governance</i> , penguatan <i>Smart City</i> yang difokuskan pada <i>Smart government, Smart Education, Smart Health, Smart economy</i> dan <i>Smart Transportation</i>	Komunikasi dan Informatika	- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik - Program Pengelolaan Arsip - Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Program Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, PERSANDIAN DAN KEARSIPAN
			Kelembagaan dan perencanaan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Perekonomian Dan Pembangunan - Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH, PERENCANAAN
				- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

NO	PRIORITAS TAHUN		FOKUS PEMBANGUNAN	UNSUR	PROGRAM	URUSAN
				Pengawasan	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	PENGAWASAN
				Penganggaran	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Pengelolaan Barang Milik - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	KEUANGAN
				Pendidikan	- Program Pengelolaan Pendidikan	PENDIDIKAN
				Kesehatan	- Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	KESEHATAN
				Perhubungan	- Program Penyelenggaraan LLAJ	PERHUBUNGAN

(Sumber: RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif, dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas. RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional. Untuk periode 2021 - 2026 RPJMD Kabupaten Kendal disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal 2021 - 2026.

1. Visi 2021 - 2026

Berdasarkan kondisi Kabupaten Kendal, serta peluang, tantangan, dan isu strategis, untuk periode 2021 - 2026 RPJMD Kabupaten Kendal menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu : **“Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan.”**

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya :

1. Handal

Handal yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.

2. Unggul

Unggul adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.

3. Makmur

Makmur yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.

4. Berkeadilan

Berkeadilan memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

2. Misi 2021 - 2026

Rumusan misi merupakan hal penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

a. Misi 1 :

Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*).

Tujuan 1 :

Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah;
2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
3. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja;
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM;
5. Meningkatnya nilai investasi;
6. Meningkatnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial.

b. Misi 2 :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0.

Tujuan 2 :

Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berbudi pekerti luhur.

Sasaran :

1. Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur;
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan *responsif gender*.

c. Misi 3 :

Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tentram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.

Tujuan 3 :

1. Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusivitas wilayah;
2. Meningkatkan kualitas kebudayaan daerah;
3. Meningkatnya kemandirian desa.

Sasaran :

1. Meningkatnya toleransi, keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya;
3. Meningkatnya kualitas desa.

d. Misi 4 :

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Tujuan 4 :

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur sesuai dengan tata ruang;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan terhadap bencana.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah;

2. Meningkatnya cakupan universal akses;
3. Meningkatnya konektivitas antar wilayah;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

e. Misi 5 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Tujuan 5

Meningkatkan reformasi birokrasi dalam tata Kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran :

1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel;
2. Meningkatnya birokrasi yang kapabel;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021-2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kendal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Kendal Nomor : 060/74/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026

NO.	INDIKATOR	Kondisi Awal 2021	Target	
			2025	2026
1.	Pertumbuhan ekonomi	2,5-3,2	5,43-5,76	5,49-5,82
2.	Persentase kontribusi pariwisata dalam PAD	0,26	0,44	0,45
3.	Tingkat pengangguran terbuka	7,14	5,23	5,15
4.	Angka kemiskinan	9,89-9,79	9,19-8,89	8,89-8,69
5.	Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	3.1	3.55	3.6
6.	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	72,61	76,61	77,61
7.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	92,95	93,3	93,4
8.	Angka kriminalitas	150	146	145
9.	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	100	100	100
10.	Indeks Desa Membangun	0,7095	0,7250	0,7265
11.	Cakupan infrastruktur wilayah yang berkualitas	80,158	84,344	85,490
12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,82	59,42	59,82
13.	IRBI (Indeks Resiko Bencana)	124,57	124,57	124,57
14.	Indeks Reformasi Birokrasi	64,41	69,2	69,5
15.	Nilai SAKIP	68,55	77,55	78,55
16.	Indeks SPBE	2,76	3,91	3,91

(Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025, diolah)

C. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025 mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, dokumen

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Kendal telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah.	Persentase pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB	1,5 %
		Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD	0,44 %
		Persentase pelaku ekonomi Kreatif yang dikembangkan	30 %
		Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	3,55 %
		Persentase pertumbuhan Perdagangan besar dan retail dalam PDRB	1,5 %
2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	87,4
3	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	83,76
4	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM	Persentase UMK yang berkembang	6,5 %
5	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi	3,3
6	Meningkatnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	Tingkat Kesejahteraan I	19,68
7	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur	Harapan lama sekolah	13,7
		rata -rata lama sekolah	8,45
8	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,93
9	Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,3

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Meningkatnya toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah kasus konflik	0
		Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	1 %
11	Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	100 %
		Persentase cagar budaya yang diselestarikan	100 %
12	Meningkatnya kualitas desa	Jumlah Desa Mandiri	3
13	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	Persentase jalan kondisi mantap	96,78 %
		Persentase drainase kondisi baik	80,35 %
		Persentase luasan daerah irigasi kondisi baik	73 %
		Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	88,00 %
14	Meningkatnya cakupan universal akses	Persentase Capaian <i>Universal Access</i>	97,17 %
15	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio konektivitas	0,81
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	54,64
		Indeks kualitas udara	73,06
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,43
17	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	65
18	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	77,55
		Kasus Korupsi	0
		Opini BPK	WTP
19	Meningkatnya birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalisme ASN	77,72
		Indeks SPBE	3,91
		Indeks kematangan kelembagaan	32,96
20	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Nilai Rata rata IKM	88,47

(Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025, diolah)

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pada Tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Kendal dianggarkan melalui melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kendal dengan rincian sebagai berikut : **Anggaran Pendapatan** pada tahun 2025 sebesar Rp.2.627.087.956.238,00; dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp.706.239.693.373,00; Pendapatan Transfer senilai Rp.1.920.848.262.865,00; **Anggaran Belanja** pada tahun 2025 sebesar Rp.2.659.209.300.393,00 dengan rincian Belanja Operasi senilai Rp 2.026.400.151.596,00; Belanja Modal senilai Rp.219.344.041.547,00; Belanja Tak Terduga senilai Rp.5.265.986.000,00 dan Belanja Transfer senilai Rp.408.199.121.250,00. **Anggaran Pembiayaan** pada Tahun 2025 sebesar Rp.32.121.344.155,00.

Tabel 2.3
Pendapatan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
(APBD-P) Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	URAIAN	2025		(%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	706.239.693.373,00	701.763.507.059,00	99,37%
2	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.920.848.262.865,00	1.874.729.960.015,00	97,60%
3	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00%
JUMLAH		2.627.087.956.238,00	2.576.493.467.074,00	98,07%

(Sumber: BPKAD Kabupaten Kendal, Data Unaudited BPK Tahun 2025)

Tabel 2.4
Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
(APBD-P) Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	URAIAN	2025		(%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	BELANJA OPERASI	2.026.400.151.596,00	1.934.004.193.480,00	95,44%
2	BELANJA MODAL	219.344.041.547,00	195.487.215.581,00	89,12%
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.265.986.000,00	3.641.132.725,00	69,14%
4	BELANJA TRANSFER	408.199.121.250,00	341.859.758.656,00	83,75%
JUMLAH		2.659.209.300.393,00	2.474.992.300.442,00	93,07%

(Sumber: BPKAD Kabupaten Kendal, Data Unaudited BPK Tahun 2025)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kabupaten Kendal selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, RKT Tahun 2025, RKPD Tahun 2025, dan PK Tahun 2025.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Kerangka Pengukuran Kinerja dilakukan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor:239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja dirumuskan sebagai berikut :

- a. Jika semakin tingginya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Realisasi} - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategori Capaian Indikator

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari atau sama dengan 91%	Sangat Tinggi
2	76% sampai dengan $\leq 90\%$	Tinggi
3	66 % sampai dengan $\leq 75\%$	Sedang
4	51% sampai dengan $\leq 65\%$	Rendah
5	Kurang dari atau sama dengan 50%	Sangat Rendah

(Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Untuk menilai capaian pada setiap sasaran, secara matematis dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Banyaknya indikator dengan predikat}}{\text{Jumlah indikator sasaran}} \times X \text{ Mean } x$$

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Kendal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kabupaten Kendal dan Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Kendal Nomor: 060/74/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

Tahun 2021-2026 dan untuk Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030 untuk Tingkat Kabupaten Kendal dan Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kendal Nomor: 100.3.3.2/46/2026. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pemerintahan.

A

Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kendal telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. sebagaimana tabel 3.2 dan tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		2024	2025			
			2021	2022	Realisasi Capaian	Target	Realisasi Capaian	%	Kategori
	Misi I : Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (<i>start up</i>).								
1	Pertumbuhan ekonomi	%	2,5-3,2	5,69	5,42	5,76	7,99	120,00	Sangat Tinggi
2	Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD	%	0,26	0,27	2,45	0,44	2,01	120,00	Sangat Tinggi
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,14	7,34	5,01	5,23	4,6	113,70	Sangat Tinggi
4	Angka Kemiskinan	%	9,89-9,79	9,48	9,35	8,89	8,4	105,83	Sangat Tinggi
5	Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	%	3,1	2,53	2,88	3,55	2,78	78,31	Tinggi
	Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut <i>revolusi industri 4.0</i>								
6	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	indeks	72,61	73,19	74,34	76,61	75,07	97,99	Sangat Tinggi
7	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	92,95	93,3	94,29	93,3	94,34	101,11	Sangat Tinggi

	Misi III : Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relisiasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stake holder pembangunan.								
8	Angka kriminalitas	Per 100.000 penduduk	150	143	144	146	130	112,31	Sangat Tinggi
9	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
10	Indeks Desa Membangun	indeks	0,719	0,7299	0,74475	0,725	0,742	102,34	Sangat Tinggi
	Misi IV : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.								
11	Cakupan infrastruktur wilayah yang berkualitas	%	80,158	82,47	71,73	84,344	66,30	78,61	Tinggi
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,82	57,72	57,53	59,42	69,17	116,41	Sangat Tinggi
13	IRBI (Indeks Resiko Bencana)	Indeks	124,57	100,4	91,74	124,57	86,54	120,00	Sedang
	Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.								
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,41	66,51	66,71	69,2	77,53	112,04	Sangat Tinggi
15	Nilai SAKIP	nilai	68,55	67,83	69,97	77,55	69,79	89,99	Tinggi
16	Indeks SPBE	indeks	3,27	3,27	3,66	3,91	3,66	93,61	Sangat Tinggi

(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal Tahun 2025, diolah)

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

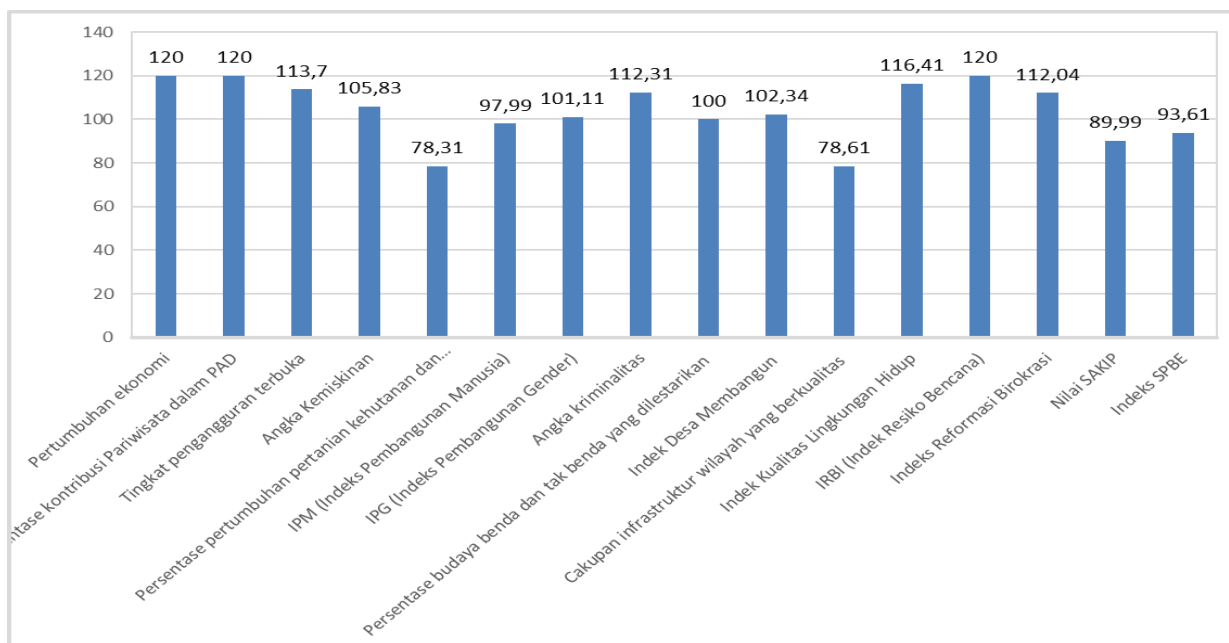
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah.	Persentase pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB	%	1,5	8,92	120,00
		Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD	%	0,44	2,01	120,00
		Prosentase pelaku ekonomi Kreatif yang dikembangkan	%	30	380	120,00
		Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	%	3,55	2,78	78,31
		Persentase pertumbuhan Perdagangan besar dan retail dalam PDRB	%	1,5	7,46	120,00
2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	87,4	97,95	112,07
3	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	83,76	76,45	91,27
4	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM	Persentase UMK yang berkembang		6,5	9.86	120,00
5	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi	Triliun	3,3	15,86	120,00
6	Meningkatnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	Tingkat Kesejahteraan I	%	19,68	19,68	100,00
7	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur	Harapan lama sekolah	Tahun	13,7	13,01	94,96
		rata -rata lama sekolah	Tahun	8,45	7,74	91,60
8	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,93	74,96	100,04
9	Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	93,3	94,34	101,11
10	Meningkatnya toleransi, keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah kasus konflik	Kasus	0	0	100,00
		Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	Tahun	30	-9,09	-30,30
11	Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	Tahun	100	100	100,00
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Tahun	100	100	100,00

12	Meningkatnya kualitas desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	3	62	120,00
13	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	Persentase jalan kondisi mantap	%	96,78	83,707	86,49
		Persentase drainase kondisi baik	%	80,35	63,73	79,32
		Persentase luasan daerah irigasi kondisi baik	%	73	51,45	70,48
		Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	88,00	81,33	92,42
14	Meningkatnya cakupan universal akses	Persentase Capaian Universal Access	%	97,17	60,42	62,18
15	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio konektivitas	Angka	0,81	0,67	82,72
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	54,64	68,55	120,00
		Indeks kualitas udara	Indeks	73,06	75,67	103,57
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	42,43	58,21	120,00
17	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	65	74	113,85
18	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	77,55	69,79	89,99
		Kasus Korupsi	Kasus	0	0	100,00
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00
19	Meningkatnya birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	77,78	82,42	105,97
		Indeks SPBE	Indeks	3,91	3,66	93,61
		Indeks kematangan kelembagaan	Indeks	32,96	38,53	116,90
20	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Nilai Rata rata IKM	Nilai	88,47	93,78	106,00

(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal Tahun 2025, diolah)

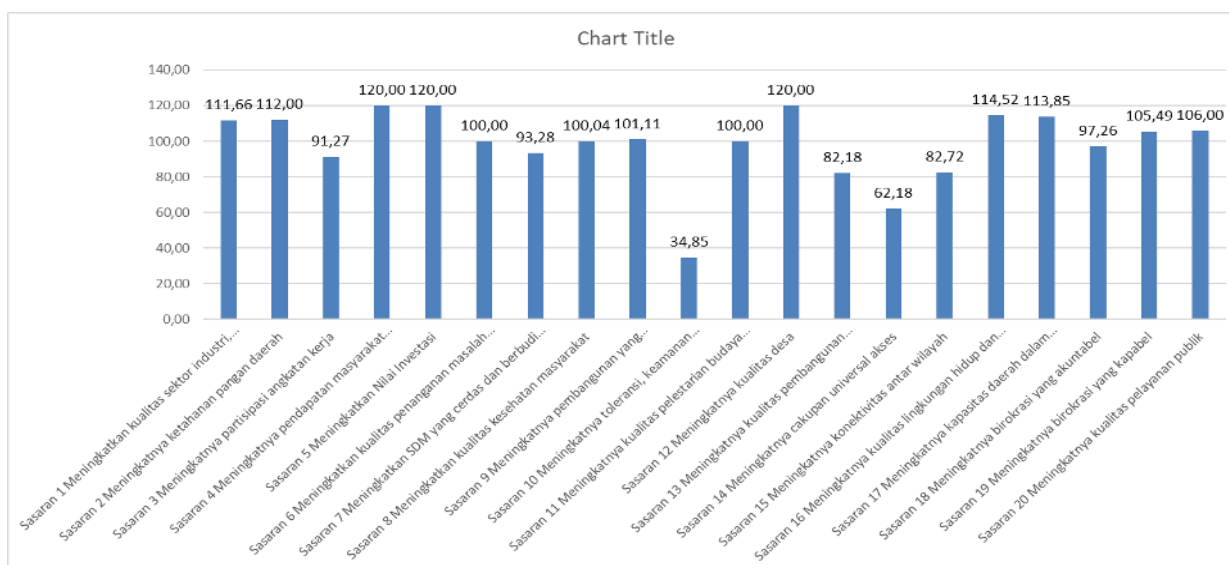
Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja persasaran diperoleh rata-rata capaian tahun 2025 97,89%. Peningkatan paling besar adalah pada sasaran meningkatnya kualitas desa pada indikator “Jumlah Desa Mandiri” dikarenakan adanya pertambahan desa mandiri menjadi 62 Desa.

Grafik 3. 1
Capaian IKU Kabupaten Kendal Tahun 2025



(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2025, diolah)

Grafik 3.2
Capaian Indikator Kinerja Persasaran



(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2025, diolah)

Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten Kendal dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 maupun RKPD Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Kendal Tahun 2025, telah ditetapkan 20 (dua puluh) sasaran dengan 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Jumlah Indikator Tiap / Per Sasaran Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1	Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah	5 indikator
2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1 indikator
3	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	1 indikator
4	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM	1 indikator
5	Meningkatnya nilai investasi	1 indikator
6	Meningkatnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	1 indikator
7	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur	2 indikator
8	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 indikator
9	Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender	1 indikator
10	Meningkatnya toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	2 indikator
11	Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya	2 indikator
12	Meningkatnya kualitas desa	1 indikator
13	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	4 indikator
14	Meningkatnya cakupan universal akses	1 indikator
15	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1 indikator
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3 indikator

No	Sasaran	Jumlah Indikator
17	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1 indikator
18	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	3 indikator
19	Meningkatnya birokrasi yang Kapabel	3 indikator
20	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1 indikator

(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2025, diolah)

Tabel 3.5
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	Predikat	Rata-rata % Capaian	Jumlah Sasaran
1	Sangat Baik	>85	16
2	Baik	70 – 85	2
3	Cukup	55 – 69	1
4	Kurang	50 – 55	-
5	Sangat Kurang	<50	1
6	N/a		-
	Jumlah		20

(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2025, diolah)

Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49.99 Sangat Kurang	50.00-64.99 Kurang	65.00-74.99 Cukup	75.00-89.99 Baik	>90 Sangat Baik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah	5	111,66 %					Sangat Baik
2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1	112,09%					Sangat Baik

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indika- tor	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49.99 Sangat Kurang	50.00- 64.99 Kurang	65.00- 74.99 Cukup	75.00- 89.99 Baik	>90 Sangat Baik
3	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	1	91,27%					Sangat Baik
4	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM	1	120,00%					Sangat Baik
5	Meningkatnya nilai investasi	1	120,00%					Sangat Baik
6	Meningkatnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	1	100%					Sangat Baik
7	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur	2	93,28%					Sangat Baik
8	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	100,04%					Sangat Baik
9	Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender	1	101,11%					Sangat Baik
10	Meningkatnya toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	2	34,85%	Sangat Kurang				
11	Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya	2	100%					Sangat Baik
12	Meningkatnya kualitas desa	1	120%					Sangat Baik
13	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	4	82,18%				Baik	
14	Meningkatnya cakupan universal akses	1	62,18%		Kurang			Sangat Baik
15	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	82,72%				Baik	Sangat Baik
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3	114,52%					Sangat Baik
17	Meningkatnya kapasitas daerah dalam	1	113,85%					Sangat Baik

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49.99 Sangat Kurang	50.00-64.99 Kurang	65.00-74.99 Cukup	75.00-89.99 Baik	>90 Sangat Baik
	penanggulangan bencana							
18	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	3	97,26%					Sangat Baik
19	Meningkatnya birokrasi yang Kapabel	3	105,49%					Sangat Baik
20	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1	106,00%					Sangat Baik

(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2025, diolah)

A.1

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Berikut ini tabel pengukuran kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

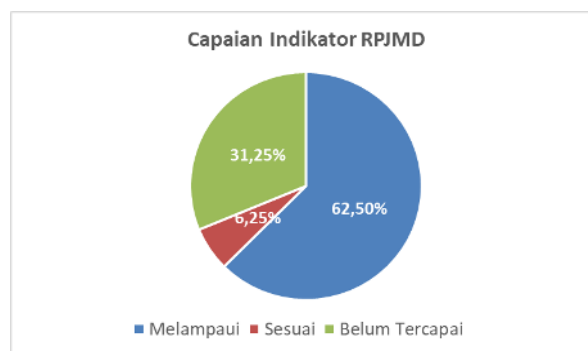
Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kendal
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator Kinerja	Sa- tuan	Kondisi Awal		2025			
			2021	2022	Target	Realisasi Capaian	%	Kategori
	Misi I: Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (<i>start up</i>).							
1	Pertumbuhan ekonomi	%	2,5-3,2	5,69	5,76	7,99	120,00	Melampaui
2	Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD	%	0,26	0,27	0,44	2,01	120,00	Melampaui
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,14	7,34	5,23	4,6	113,70	Melampaui
4	Angka Kemiskinan	%	9,89-9,79	9,48	8,89	8,4	105,83	Melampaui
5	Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	%	3,1	2,53	3,55	2,78	78,31	Belum Tercapai
	Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0							

6	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Indeks	72,61	73,19	76,61	75,07	97,99	Belum Tercapai
7	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	92,95	93,3	93,3	94,34	101,11	Melampaui
Misi III: Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stake holder pembangunan.								
8	Angka kriminalitas	Per 100.000 penduduk	150	143	146	130	112,31	Melampaui
9	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100,00	Sesuai
10	Indeks Desa Membangun	indeks	0,719	0,729 9	0,725	0,742	102,34	Melampaui
Misi IV: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.								
11	Cakupan infrastruktur wilayah yang berkualitas	%	80,158	82,47	84,344	66,30	78,61	Belum Tercapai
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,82	57,72	59,42	69,17	116,41	Melampaui
13	IRBI (Indeks Resiko Bencana)	Indeks	124,57	100,4	124,57	86,54	120,00	Melampaui
Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.								
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,41	66,51	69,2	77,53	112,04	Melampaui
15	Nilai SAKIP	nilai	68,55	67,83	77,55	69,79	89,99	Belum Tercapai
16	Indeks SPBE	indeks	3,27	3,27	3,91	3,66	93,61	Belum Tercapai

(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2025, diolah)

Grafik 3.3
Capaian Indikator RPJMD



(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2025, diolah)

A.2

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target RPJMD

Berikut ini Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir pada RPJMD.

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Target RPJMD

Misi	Indikator	Satuan	Target akhir RPJMD 2021-2026	Tahun 2024		Capaian RPJMD 2021-2026 sd. 2025			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase	Status Capaian
Misi I: Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (<i>start up</i>).									
1	Pertumbuhan ekonomi	%	5,49-5,82	5,38-5,70	5,42	5,76	7,99	120,00	Melampaui
2	Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD	%	0,45	0,43	2,45	0,44	2,01	120,00	Melampaui
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,15	5,43	5,01	5,23	4,6	113,7	Melampaui
4	Angka Kemiskinan	%	8,89-8,69	9,39-9,19	9,35	9,19-8,89	8,4	105,83	Melampaui
5	Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	%	3,6	3,5	2,88	3,55	2,78	78,31	Belum Tercapai
Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0									
6	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Indeks	77,61	75,61	74,34	76,61	75,07	97,99	Belum Tercapai

7	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	93,4	93,2	94,29	93,3	94,34	101,11	Melampaui
Misi III: Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stake holder pembangunan.									
8	Angka kriminalitas	Per 100.000 penduduk	145	147	144	146	130	112,31	Melampaui
9	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100,00	Sesuai
10	Indeks Desa Membangun	indeks	0,7265	0,7235	0,74475	0,725	0,742	102,34	Melampaui
Misi IV: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.									
11	Cakupan infrastruktur wilayah yang berkualitas	%	85,490	83,198	71,73	84,344	66,30	78,61	Belum Tercapai
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,82	59,02	57,53	59,42	69,17	116,41	Melampaui
13	IRBI (Indeks Resiko Bencana)	Indeks	124,57	124,57	91,74	124,57	86,54	120	Melampaui
Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.									
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,5	68,32	75,04	69,2	77,53	112,04	Melampaui
15	Nilai SAKIP	nilai	78,55	75,55	69,97	77,55	69,79	89,99	Belum Tercapai
16	Indeks SPBE	indeks	3,91	3,75	3,66	3,91	3,66	93,61	Belum Tercapai

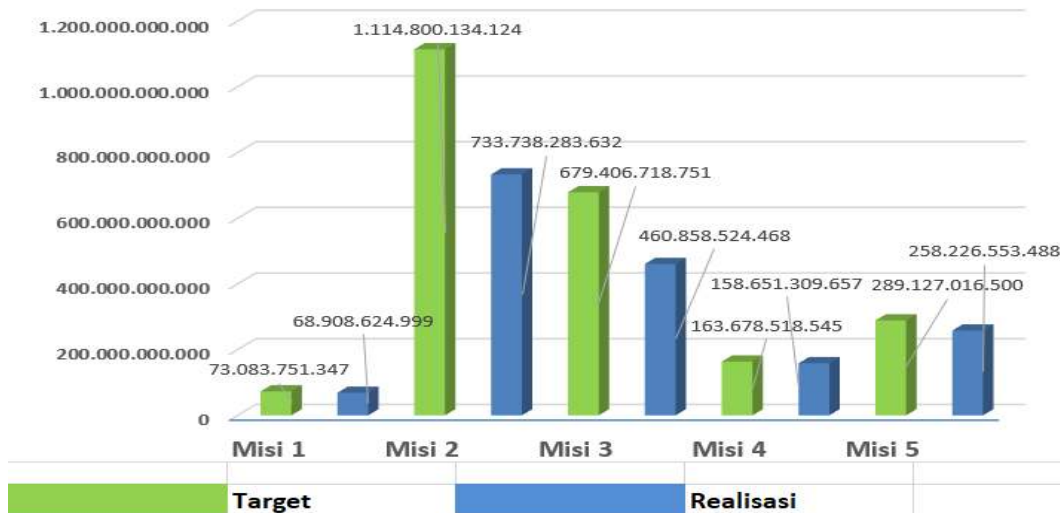
(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2025, diolah)

A.3

Analisis Efisiensi Sumber Daya Berbanding Hasil

3.1. Efisiensi Sumber Daya

Grafik 3.4
Penyandingan Target dan Realisasi Anggaran 2025



(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2025, diolah)

Pengukuran capaian dan efisiensi atas visi-misi yang terjabarkan dalam dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, maka pengukurannya dilakukan melalui capaian Tujuan, Sasaran dan Program-program yang telah dilaksanakan pada :

Misi pertama, memuat 3 (tiga) Tujuan, alokasi anggaran pada tujuan ke-1 pada tahun 2025 sebesar Rp.48.320.992.670,00 dengan realisasi Rp.45.838.257.039,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 2.482.735.631,00 atau 5,14%. Tujuan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah, dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Pariwisata
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Pertanian
 - c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Kelautan dan Perikanan

- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Penanaman Modal
2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah, dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis guna mendukung pencapaian tujuan ke-2 pada tahun 2025 sebesar Rp.14.103.157.380,00 terealisasi Rp.13.356.797.235,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.746.360.145,00 atau 5,29%. Tujuan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Tenaga Kerja
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM, dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Koperasi UMKM
3. Meningkatnya nilai investasi, dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Penanaman Modal

Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis guna mendukung pencapaian tujuan ke-3 pada tahun 2025 sebesar Rp.10.659.601.297,00 terealisasi Rp.9.713.570.725,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.946.030.572,00 atau 8,87%. Tujuan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial, dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Pemberdayaan Sosial
 - b. Program Rehabilitasi Sosial
 - c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Misi kedua, terdapat 1 (satu) Tujuan, dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 sebesar Rp.1.114.800.134.124,00 terealisasi Rp.733.738.283.632,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.381.061.850.492,00 atau 34,18%. Tujuan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur, dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Perpustakaan
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, dan dilaksanakan melalui program:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Kesehatan
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Pengendalian Penduduk, KB
 - c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Pemuda Olahraga
3. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender, dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi ketiga, terdapat 3 (tiga) Tujuan, dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis guna mendukung pencapaian tujuan ke-1 pada tahun 2025 sebesar Rp.7.434.343.400,00 terealisasi Rp.6.885.817.185,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 548.526.215,- atau 7,38%. Tujuan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya toleransi, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, yang dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)
 - b. Program Penanggulangan Bencana

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis guna mendukung pencapaian Tujuan ke-2 pada tahun 2025 sebesar Rp.664.276.156.876,00 terealisasi

Rp.447.140.985.875,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.217.135.171.001,00 atau 32,69%. Tujuan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya, yang dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Kebudayaan

Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis guna mendukung pencapaian Tujuan ke-3 pada tahun 2025 sebesar Rp.7.696.218.475,00 terealisasi Rp.6.831.721.408,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.864.497.067,00 atau 11,23%. Tujuan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas desa, yang dilaksanakan melalui program :
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi keempat, terdapat 2 (dua) Tujuan, dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis guna mendukung pencapaian Tujuan ke-1 pada tahun 2025 sebesar Rp.144.316.713.011,00 terealisasi Rp.142.856.991.424,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.1.459.721.587,00 atau 1,01%. Tujuan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah. dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Meningkatnya cakupan universal akses, dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Penyelenggaraan Jalan
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Penyelenggaraan LLAJ.

Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis guna mendukung pencapaian Tujuan ke-2 pada tahun 2025 sebesar Rp.19.361.805.534,00 terealisasi Rp.15.794.318.233,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.3.567.487.301,00 atau 18,43%. Tujuan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana. dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan LH Kab/Kota
 - b. Program Pengelolaan Persampahan
2. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Penanggulangan Bencana.

Misi kelima, terdapat 1 (satu) Tujuan, dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis guna mendukung pencapaian Tujuan pada tahun 2025 sebesar Rp.289.127.016.500,00 terealisasi Rp.258.226.553.488,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.30.900.463.012,00 atau 10,69%. Tujuan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel. dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Sekretariat Daerah
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Perencanaan, Litbang
 - c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Pengawasan
 - d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Keuangan
2. Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel. dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Kepegawaian
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian
 - c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Kearsipan
 - d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Sekretariat Daerah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik. dan dilaksanakan melalui program :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Dukcapil

- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Sekretariat DPRD
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Urusan Kecamatan

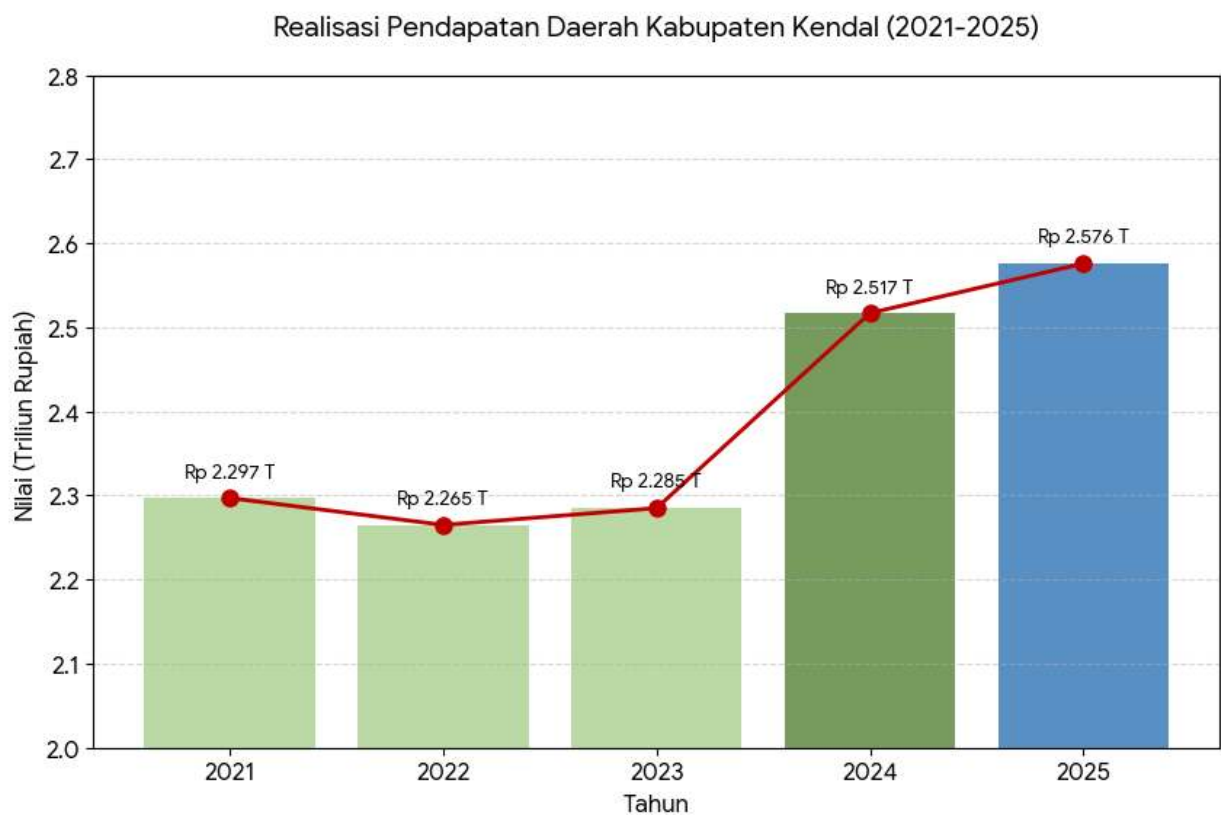
3.2. Sumberdaya Pendapatan Daerah

Pendapatan TA 2025 terealisasi senilai Rp.2.576.493.467.074,00 atau 98,70% dari anggarannya senilai Rp.2.627.087.956.238,00.

. Realisasi pendapatan mengalami kenaikan senilai Rp.58.732.633.072,00 atau 2,28% jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp.2.517.760.834.002,00. Realisasi pendapatan berasal dari PAD senilai Rp.701.763.507.059,00. Pendapatan Transfer senilai Rp.1.874.729.960.015,00. Dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp.0,00.

Perkembangan realisasi pendapatan sejak TA 2020 disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3.5
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2021 s.d. 2025



(Sumber: djpk.kemenkeu.go.id 2026, diolah)

Sumber pendapatan meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	URAIAN	2025		(%)	2024
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	706.239.693.373,00	701.763.507.059,00	99,37%	517.108.168.048,00
2	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.920.848.262.865,00	1.874.729.960.015,00	97,60%	2.000.652.665.954,00
3	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00%	0,00
JUMLAH		2.627.087.956.238,00	2.576.493.467.074,00	98,07%	2.517.760.834.002,00

(Sumber: BPKAD Kabupaten Kendal, Data Unaudited BPK Tahun 2025)

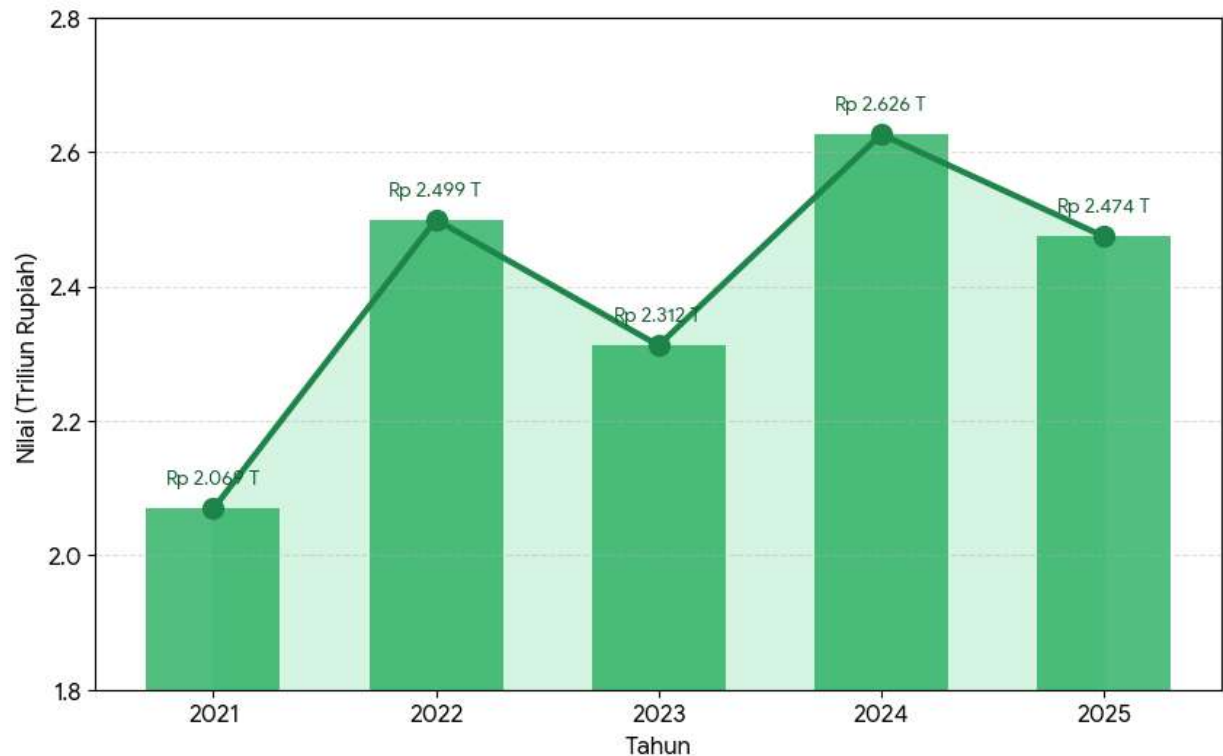
Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 senilai Rp.2.576.493.467.074,00 atau 98,70% dari anggarannya senilai Rp.2.627.087.956.238,00.

Belanja TA 2025 terealisasi senilai Rp.2.474.992.300.442,- atau 93,07% dari anggaran yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2025 senilai Rp.2.659.209.300.393,00. Belanja TA 2025 mengalami penurunan Rp.151.135.968.451,00 atau 6,11% dari realisasi TA 2024 senilai Rp.2.626.128.268.893,00.

Realisasi Belanja TA 2025 terdiri atas Belanja Operasi senilai Rp.1.934.004.193.480,00. Belanja Modal senilai Rp.195.487.215.581,00. Belanja Tidak Terduga senilai Rp.3.641.132.725,00. dan realisasi Belanja Transfer senilai Rp.341.859.758.656,00. Perkembangan realisasi belanja sejak TA 2021 disajikan pada grafik berikut:

Grafik 3.6
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2021-2025

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kendal (2021-2025)



(Sumber: djpk.kemenkeu.go.id 2026, diolah)

Berdasarkan realisasi Pendapatan senilai Rp.2.576.493.467.074,00 dan realisasi Belanja Daerah senilai Rp.2.474.992.300.442,00, dimana jumlah ini sudah termasuk transfer sehingga terdapat surplus anggaran pada TA 2025 senilai Rp.101.501.166.632,00. Sedangkan realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA 2025 senilai Rp.29.791.725.086,56, yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan senilai Rp.29.791.725.086,56 tanpa adanya pengeluaran pembiayaan. Surplus Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto membentuk SiLPA TA 2025 senilai Rp.131.292.891.718,56.

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	URAIAN	2025		(%)	2024
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
1	BELANJA OPERASI	2.026.400.151.596,00	1.934.004.193.480,00	95,44	2.000.107.920.722,00
2	BELANJA MODAL	219.344.041.547,00	195.487.215.581,00	89,12	212.877.821.607,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.265.986.000,00	3.641.132.725,00	69,14	2.989.866.000,00
4	BELANJA TRANSFER	408.199.121.250,00	341.859.758.656,00	83,74	410.152.660.564,00
JUMLAH		2.659.209.300.393,00	2.474.992.300.442,00	93,07	2.626.128.268.893,00

(Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal Unaudited BPK RI Tahun 2025)

3.3. Permasalahan dan Solusi

Realisasi target pendapatan daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperoleh solusi atas permasalahan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Permasalahan eksternal antara lain kurangnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak/ retribusi, potensi pendapatan dari pemerintah pusat maupun provinsi yang belum optimal pemanfaatannya, kurang koordinasi terkait pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat waktu, sehingga pencairan dana transfer yang didasarkan progres pekerjaan tidak tercairkan. Adapun permasalahan internal pengelolaan pendapatan antara lain kurang tertibnya administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan daerah dalam mendukung PAD. Untuk melaksanakan amanat RPJMD yaitu adanya peningkatan target PAD terutama sektor pajak daerah, beberapa upaya dalam rangka pencapaian dan peningkatan realisasi target pendapatan telah dilakukan yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi khususnya peningkatan PAD dengan kegiatan yang dilaksanakan secara simultan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan, penagihan kepada wajib pajak dan retribusi daerah melalui penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan dan penggunaan sistem informasi untuk lebih memudahkan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat wajib pajak/retribusi.

2. Terus memperbaiki sistem dan alur digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui penyempurnaan fitur dan kerjasama baik dengan lembaga keuangan maupun dengan non bank.
3. Penyelenggaraan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang menjamin bahwa setiap pendapatan yang menjadi hak daerah sudah ditetapkan, dipungut/dikenakan, dicatat, disetorkan ke Kas Daerah dalam jumlah yang benar dan tepat waktu.
4. Sosialisasi/penyuluhan kepada wajib pajak/retribusi dan penerapan *self assesment* serta penegakan disiplin pengelolaan pajak dengan penagihan aktif oleh petugas pajak serta penindakan atas pelanggaran perda.
5. Mengupayakan ketersediaan data pendapatan, analisis serta perhitungan penerimaan pajak dan retribusi sesuai dengan potensi yang akurat serta merencanakan target sesuai dengan potensi riil, sesuai kajian potensi pendapatan yang rasional dan terukur serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
6. Peningkatan koordinasi antara pengelola pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan dukungan dari lintas SKPD.
7. Pendekatan pelayanan dengan menambah tempat pembayaran serta pelayanan jemput bola dengan menjalin kerjasama dengan BPD Jawa Tengah.
8. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pencairan dana transfer.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja antara lain tidak optimalnya realisasi anggaran Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga, adanya pegawai yang berakhir masa kerjanya (pensiun) sehingga anggaran belanja pegawai, tunjangan penghasilan yang tidak optimal terserap, biaya pemungutan PBB, insentif pengelolaan pajak dan retribusi. Adapun permasalahan internal antara lain proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat pelaksanaannya sehingga pekerjaan fisik tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, disamping itu juga ada efisiensi/penghematan belanja, antara lain dengan pelaksanaan lelang dengan nilai kontrak di bawah pagu anggaran dan atau pembelian barang dan jasa di bawah harga standar harga/kegiatan. Solusi yang dilakukan terkait dengan perencanaan belanja daerah Tahun 2025 antara lain:

1. Perlunya perencanaan kegiatan yang lebih baik serta proses perencanaan dan pengadaan barang/jasa dilaksanakan lebih awal.

2. Perlunya pemantauan progres kegiatan, bila lambat/tidak sesuai jadwal perlu penyelesaian masalahnya dan percepatan kegiatan tersebut, juga pencermatan bila ada kegiatan yang tidak sesuai atau diperkirakan tidak bisa dilaksanakan segera diambil solusi penyelesaiannya.
3. Penyelesaian program dan kegiatan dilaksanakan secara bertahap dengan memanfaatkan sumber dana yang tersedia secara efektif dan selektif karena pendapatan APBD Kabupaten Kendal masih sangat tergantung pada dana perimbangan, dana pemerintah lainnya, serta bantuan keuangan Pemerintah Provinsi.
4. Perlunya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan Kementerian terkait agar terwujud harmonisasi pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan maupun perencanaannya di tahun selanjutnya.
5. Beban belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang cukup tinggi telah diupayakan bisa terpenuhi secara keseluruhan sehingga tidak menimbulkan beban yang lebih berat pada tahun berikutnya.
6. Memenuhi prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait dengan memperhatikan prioritas nasional, regional, dan daerah.

A.4

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja

Capaian Sasaran 1: Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah

Capaian Kinerja Sasaran ini sebesar 111,66% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Capaian Sasaran 1

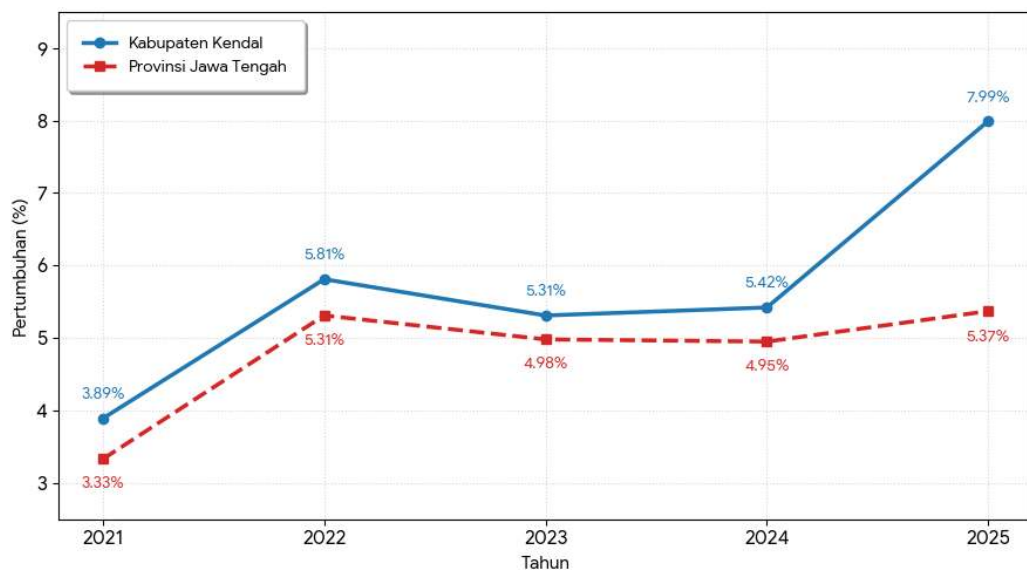
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah.	Persentase pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB	1,5	8,92	120,00
		Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD	0,44	2,45	120,00
		Persentase pelaku ekonomi Kreatif yang dikembangkan	30	380	120,00

	Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	3,55	2,78	78,31
	Persentase pertumbuhan Perdagangan besar dan retail dalam PDRB	1,5	7,46	120,00

(Sumber: Bapperida Kendal Tahun 2026)

Grafik 3.7
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 – 2025

Tren Pertumbuhan Ekonomi (PE) 2021 - 2025



(Sumber: BPS Tahun 2025)

Gambar 3.1
Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB Kabupaten Kendal 2025



(Sumber: Bapperida Kendal Tahun 2026)

Kabupaten Kendal untuk mencapai indikator “*Persentase pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB*” dilaksanakan dengan **Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**. Langkah-langkah dalam upaya pencapaiannya adalah dengan meningkatkan intensitas serta pendampingan pasca pelatihan bagi usaha

industri pengolahan terutama pasca pandemi *Covid-19*, serta melakukan kebijakan strategis dalam meningkatkan investasi melalui sinergitas *investment ecosystem* menuju *Competitive Kendal*.

Untuk mencapai indikator “*Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD*” dilaksanakan dengan **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan Program Pemasaran Pariwisata**. Capaian Indikator tersebut murni dari pendapatan 3 (tiga) obyek pariwisata yang dikelola pemerintah daerah yaitu Pantai Sendang Sikucing, Kolam Renang Boja, dan Curug Sewu, namun pembangunan dan pemeliharaan destinasi wisata tersebut belum berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. Optimalisasi juga dilakukan dengan inovasi pemasaran antara lain dengan menyelenggarakan event-event seperti pertunjukan seni, memuat dalam konten-konten *Instagram* maupun majalah cetak lainnya, serta menyelenggarakan pameran di tingkat kabupaten, mengikuti pelaksanaan pameran provinsi maupun nasional. Kedepan penghitungan kontribusi PAD dari sektor pariwisata akan dikembangkan melalui pajak hotel, pajak resto, pajak hiburan maupun pajak keramaian umum lainnya serta retribusi dan pajak dari tempat wisata yang dikelola oleh pihak swasta.

Untuk mencapai indikator “*Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan*” dilaksanakan dengan **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**. Sertifikat *Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability* (CHSE) yang merupakan sertifikasi kesehatan sanitasi dan kesehatan lingkungan di sekitar obyek wisata yang dipersyaratkan dilaksanakan melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif dan fasilitasi untuk memperoleh sertifikat HAKI atas kreatifitas pelaku ekonomi kreatif.

Untuk mencapai indikator “*Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB*” dilaksanakan melalui 6 (enam) program yaitu **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**. Langkah dan strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sektor pertanian melalui pengembangan bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, peningkatan prasarana pertanian yang mendorong produksi pertanian serta meningkatkan kapasitas petani, peningkatan produksi perikanan melalui

peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan budidaya perikanan, dan peningkatan kapasitas pengolah ikan. Namun capaian kinerja ini lebih dipengaruhi oleh berkurangnya lahan pertanian yang disebabkan oleh bencana rob, perubahan kondisi alam, dan alih fungsi lahan pertanian.

Untuk mencapai indikator “*Persentase pertumbuhan Perdagangan besar dan retail dalam PDRB*” dilaksanakan dengan ***Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Pengembangan Ekspor, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting***. Langkah strategis yang dilakukan dengan Peningkatan kualitas perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas ekspor, penataan izin pelaku usaha, peningkatan kualitas pasar dan penataan PKL serta perlindungan terhadap konsumen. Pertumbuhan UKM dan pelaku ekonomi kreatif turut mendorong capaian pertumbuhan perdagangan terutama perdagangan retail.

Capaian Sasaran 2: Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Sasaran ini, diukur dengan indikator “Skor Pola Pangan Harapan”, tercapai skor 97,95 dari target 87,4 dapat terealisasi 112,07%. dilaksanakan dengan ***Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan***. Langkah strategi yang dilakukan adalah dengan menjaga ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan melalui peningkatan ketersediaan pangan, keanekaragaman pangan, distribusi pangan serta peningkatan konsumsi yang bergizi dan seimbang. Berdasarkan data konsumsi hasil survei SUSENAS tahun 2025. Adanya pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan. sehingga penduduk dapat mengakses pangan dengan harga murah dan terjangkau untuk mempertahankan dan memenuhi asupan kalori, selain itu adanya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, sehingga tercipta keragaman dan keseimbangan pangan. Kelemahan capaian kinerja ini dipengaruhi oleh kurangnya diversifikasi pangan dan pembinaannya kepada masyarakat.

Capaian Sasaran 3: Meningkatnya partisipasi angkatan kerja

Indikator untuk mengukur ketercapaian sasaran ini adalah “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”, dengan target 83,76%, dan dapat terealisasi 76,45% sehingga capaiannya 91,27%. dilaksanakan dengan ***Program Perencanaan Tenaga***

Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, Program Penempatan Tenaga Kerja.

Langkah strategi yang dilakukan adalah dengan upaya menurunkan pengangguran melalui peningkatan daya saing tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, penciptaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan permintaan investor di kawasan industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pembinaan dan perlindungan tenaga kerja dalam hubungan perselisihan tenaga kerja. Capaian kinerja ini dikarenakan belum optimalnya program “Kendal Karier”, disamping selisih antara jumlah lowongan kerja yang tidak berbanding lurus dengan jumlah pelamar kerja, termasuk afirmasi pekerja lokal dengan jumlah pekerja yang diperlukan di KIK, dimana setiap perusahaan wajib menyerap minimal 70% tenaga kerja lokal. Namun demikian, angka tersebut belum optimal, mengingat capaian partisipasi angkatan kerja masih dibawah 100% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian Sasaran 4: Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM

Salah satu Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur adalah “Persentase UMK yang berkembang” dari target tahun 2025 sebesar 6,5% terealisasi 9,86%, persentase capaian 120,00%. dilaksanakan dengan ***Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM),- Program Pengembangan UMKM.*** Langkah dan strategi yang dilakukan adalah dengan peningkatan kualitas dan kuantitas usaha mikro melalui fasilitasi izin usaha dan PIRT, peningkatan akses permodalan dengan koperasi, pengembangan produk unggulan serta pengembangan pemasaran produk berbasis teknologi, sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan UMKM dalam menciptakan produk UMKM yang unggul dan berdaya saing; Peningkatan kapasitas UMKM untuk berkembang skala usahanya dari Mikro menjadi Usaha Kecil; dan peningkatan kualitas pendataan dan penyediaan sistem informasi UMKM yang mudah diakses

Capaian Sasaran 5: Meningkatnya nilai investasi

Sasaran ini pada tahun 2025 ditargetkan 3,3 Triliun dan dapat terealisasi 15,86 Triliun atau tercapai 120,00% melalui ***Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dan Program Pelayanan Penanaman Modal.***

Gambar 3.2
Lima (5) Besar Realisasi Investasi di Provinsi Jawa Tengah 2025



Investasi di Kabupaten Kendal semakin meningkat, seiring dengan berubahnya pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta didukung beroperasinya Pelabuhan Kendal. Tersedianya Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; dan ditetapkannya KIK sebagai Kawasan Ekonomi Khusus; Kemudahan berinvestasi di Kabupaten Kendal; Digitalisasi potensi dan peluang investasi Kabupaten Kendal; dan Kondusifitas wilayah. Secara keseluruhan KIK telah menarik 136 investor dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Cina, Jerman, Thailand, dan Hongkong. Sampai tahun 2025 ini sudah beroperasi 46 (empat puluh enam) perusahaan, dalam komisioning 12 (dua belas) perusahaan, dalam konstruksi 24 (dua puluh empat) perusahaan, dan dalam proses administrasi 54 (lima puluh empat) perusahaan.

Nilai investasi di KIK terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020 nilai investasi mencapai Rp 3,14 triliun, tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 3,8 triliun dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 5,195 triliun, pada tahun 2023 meningkat kembali realisasinya menjadi Rp. 6,398 triliun, pada tahun 2024 meningkat menjadi 10,59 triliun, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 15,85 triliun.

Pada tahun 2025, jumlah tenaga kerja di Kabupaten Kendal yang terserap mencapai 666.302 orang. Jumlah ini meningkat 56.125 orang dari tahun 2024 yang tercatat 610.177 orang. Selain itu, angka pengangguran di Kabupaten Kendal juga menurun 12,8 % pada tahun 2025. Angka ini turun dari 32.194 orang pada tahun 2024 menjadi 28.539 orang pada tahun 2025. Hal ini merupakan hasil atas upaya yang

dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk menekan angka pengangguran, seperti: Menyelenggarakan acara job fair, Melakukan MoU dengan usaha/perusahaan, Melakukan pelatihan bagi UMKM, Mengembangkan aplikasi Kendal Karir. Selain itu, Kawasan Industri Kendal juga telah menyerap 25.630 tenaga kerja sepanjang tahun 2025, sedangkan dari nilai ekspor pada tahun 2024 mencapai US\$ 50,5 juta, dan pada tahun 2025 mencapai US\$ 63,4 juta. Di samping itu, investasi khususnya pada skala kecil dan menengah diluar KIK juga meningkat setiap tahunnya, sehingga diproyeksikan akan meningkat di tahun 2025, sehingga mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal.

Capaian Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial

Capaian sasaran ini diperoleh dari pengukuran indikator “Tingkat Kesejahteraan I”, pada tahun ini dari target 19,68% dapat terealisasi 19,68%, persentase capaian 100,00%, melalui **Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, serta Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**, langkah peningkatan upaya penurunan kemiskinan melalui pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial sesuai SPM, peningkatan peran PSKS dalam penanganan PMKS, dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial serta meningkatkan sinergitas penanganan kemiskinan. Dengan menerapkan kebijakan “Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal”.

Capaian Sasaran 7: Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur

Sasaran ini diukur melalui indikator: “Harapan lama sekolah” dan “rata-rata lama sekolah” dengan masing-masing target dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian Sasaran 7

Sasaran	Indikator	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Capaian (%)
Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur	Harapan lama sekolah	13,7	13,01	94,96
	Rata-rata lama sekolah	8,45	7,74	91,60

(Sumber: Bapperida Kendal Tahun 2026)

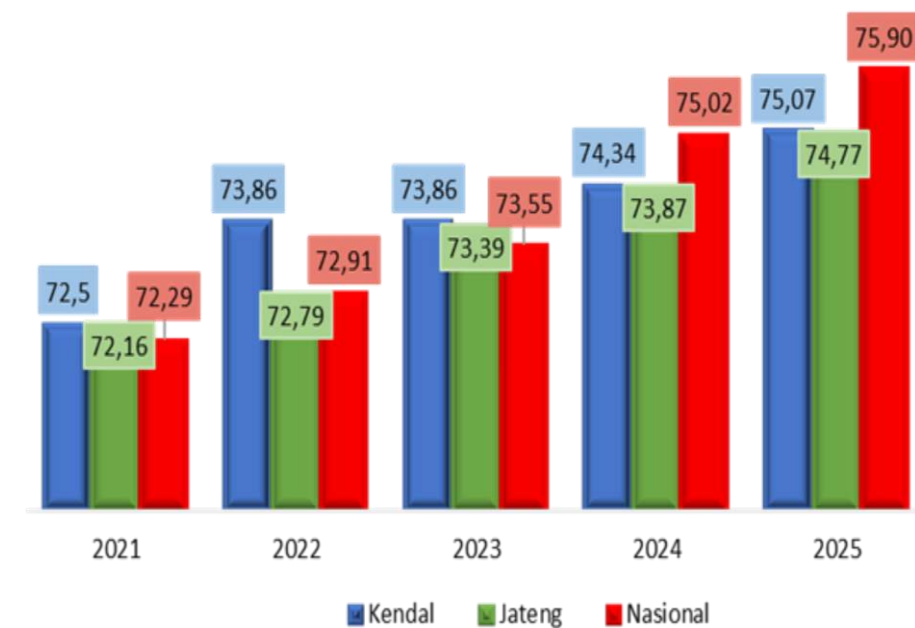
Melalui ***Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dan Program Pembinaan Perpustakaan***, dengan langkah strategi meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui penyelenggaraan beasiswa pada penduduk miskin dan berprestasi, pemberian perlengkapan sekolah sesuai dengan SPM, peningkatan pendidikan 12 tahun, peningkatan tata kelola pelayanan pendidikan, pengembangan kesetaraan untuk meningkatkan rata rata lama sekolah, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, mendukung pembelajaran daring dengan mengaplikasikan *Learning Management System* pada jenjang pendidikan kewenangan kabupaten serta pengembangan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan, pemajuan budaya melalui peningkatan pelestarian budaya baik benda maupun tak benda, peningkatan literasi pada masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan peningkatan minat baca.

Capaian Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah “Usia Harapan Hidup” dengan target 74,93 tahun, dapat terealisasi 74,96 tahun, persentase capaiannya 100,04%. Melalui ***Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program Pembinaan Keluarga Berencana(KB), Program Pengendalian Penduduk, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan***.

Dengan langkah strategi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan fasilitas, layanan kesehatan yang mudah diakses sesuai dengan SPM, penyediaan kualitas tenaga kesehatan, penyediaan kebutuhan farmasi di pelayanan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan keselamatan ibu dan anak, peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan kepemilikan jaminan pemeliharaan kesehatan (JKN) menuju UHC (*Universal Health Coverage*) perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk, dan peningkatan peserta KB, serta peningkatan peran pemuda dan olahraga melalui peningkatan prestasi.

Grafik 3.8
Indeks Pembangunan Manusia

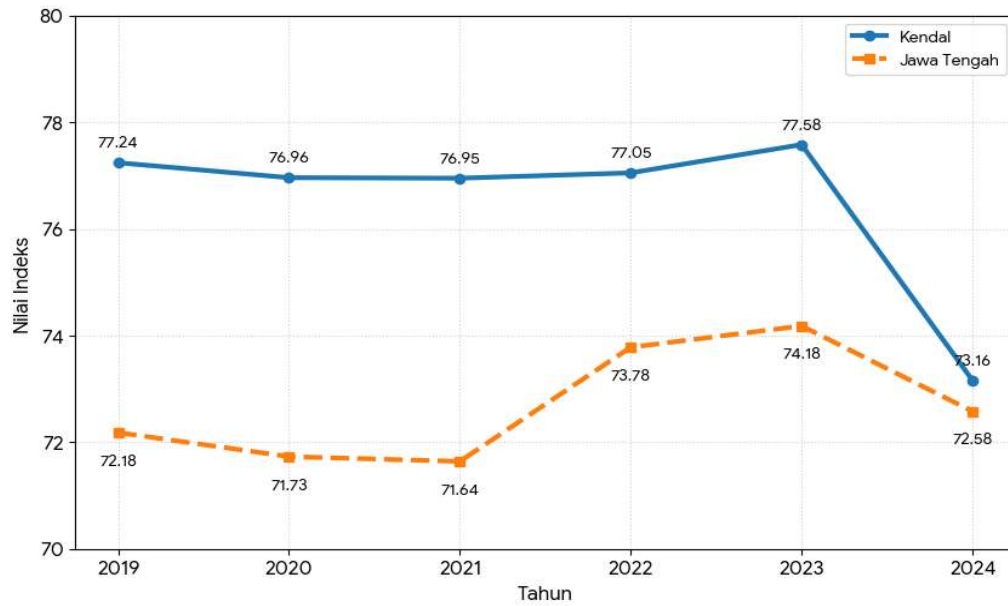


(Sumber: Bapperida Kendal Tahun 2026)

Capaian Sasaran 9 : Meningkatnya Pembangunan yang Berkeadilan dan Responsif Gender

Sasaran ini diukur melalui indikator “IPG (Indeks Pembangunan Gender)” dengan target 93,3 dan terealisasi 94,34, persentase capaian 101,11%. Menggunakan **Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Program Perlindungan Khusus Anak**, dengan langkah strategi peningkatan kesetaraan dan keadilan *gender* melalui peningkatan PUG di semua perangkat daerah, peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus.

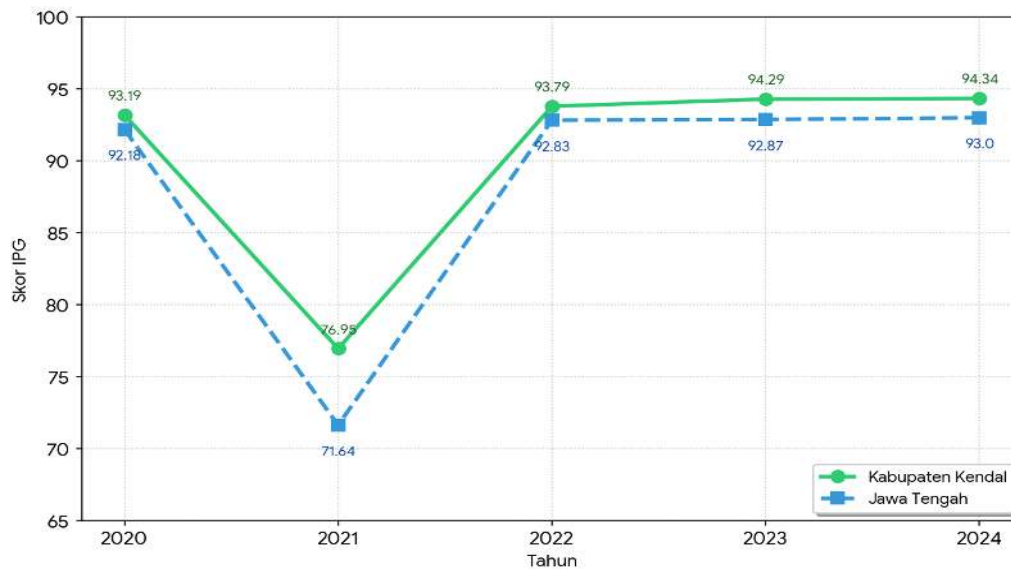
Grafik 3.9
Perkembangan IDG Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah
Sampai Tahun 2024



(Sumber: BPS Kendal Tahun 2025, diolah)

Grafik 3.10
Perkembangan IPG Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah
Sampai Tahun 2024

Tren Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2020-2024



(Sumber: BPS Kendal Tahun 2025, diolah)

Capaian Sasaran 10: Meningkatnya toleransi, keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur sasara ini adalah “Jumlah kasus konflik” dan “Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban” dengan capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13
Capaian Sasaran 10

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya toleransi, keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah kasus konflik	0	0	100,00
	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	30	-9,09	-30,30

(Sumber: Bapperida Kendal Tahun 2026)

Dilaksanakan dengan **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum** dengan langkah strategi pencegahan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan pemahaman cinta tanah air, pelaksanaan bela negara, peningkatan kerukunan antar umat beragama serta pelaksanaan pemilu yang kondusif, dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum melalui penegakan perda, peningkatan disiplin aparatur, dan peningkatan pelayanan HUMANIS sesuai dengan SPM.

Penurunan gangguan keamanan pada tahun 2020 ada 489 kasus, tahun 2021 ada 429 kasus, terjadi penurunan 60 kasus: ($60/489 \times 100\% = 12,26\%$), pada tahun 2024 ada 89 kasus, dan pada tahun 2025 ada 130 kasus, sehingga terjadi kenaikan 41 kasus atau ($41/89 \times 100\%$) naik 46,06%.

Capaian Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban -9,09, kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun berjalan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika sosial masyarakat, meningkatnya aktivitas publik, serta keterbatasan sumber daya dalam pengawasan dan penindakan.

Capaian Sasaran 11: Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya

Rincian atas capaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Capaian Sasaran 11

Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	100	100	100
	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100	100	100

(Sumber: Bapperida Kendal Tahun 2026)

Dilaksanakan dengan **Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya** dengan langkah strategi, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian budaya dan cagar budaya, meningkatkan promosi budaya dan warisan budaya, mengadakan event kebudayaan sebagai salah satu sarana promosi kebudayaan, memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat melalui berbagai event yang dilaksanakan, menjaga keberadaan cagar budaya yang ada dan mempromosikan cagar budaya sebagai salah satu destinasi pariwisata maupun destinasi pembelajaran siswa.

Capaian Sasaran 12: Meningkatnya kualitas desa

Indikator Kinerja Utama yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran ini adalah “Jumlah Desa Mandiri” dengan target 3 desa dapat terealisasi 62 desa tahun 2025, persentase capaian 120,00%. Dilaksanakan dengan **Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat** dengan langkah strategi meningkatkan kualitas desa melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penataan desa, peningkatan administrasi desa, mendorong inovasi masyarakat melalui fasilitas dan kerjasama, peningkatan dan pembentukan BUMDES.

Capaian Sasaran 13: Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Capaian Sasaran 13

Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur	Persentase jalan kondisi mantap	96,78	83,71	86,49

dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	Persentase drainase kondisi baik	80,35	63,78	79,32
	Persentase luasan daerah irigasi kondisi baik	73	51,45	70,48
	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	88	81,33	92,42

(Sumber: Bapperida Kendal Tahun 2026)

Dilaksanakan dengan **Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** dengan langkah strategi peningkatan konektivitas wilayah melalui kualitas infrastruktur jalan, drainase, pembangunan dan rehabilitasi, manajemen rekayasa lalu lintas, peningkatan sarana prasarana keselamatan lalu lintas dan pengembangan penerangan jalan kewenangan kabupaten, melalui peningkatan kelas jalan, peningkatan kualitas pemeliharaan jalan dan jembatan, perbaikan drainase rusak berat dan ringan serta pembangunan drainase baru, peningkatan kualitas pengendali banjir, longsor melalui peningkatan kapasitas dan kualitas irigasi dan drainase, peningkatan pembangunan sesuai dengan RTRW melalui peningkatan pemahaman RTRW dan penegakan Perda RTRW.

Capaian Sasaran 14: Meningkatnya cakupan universal akses

Kebutuhan pokok utama masyarakat paling dominan yang menjadi indikator sasaran ini adalah “Persentase Capaian *Universal Access*” dari target 97,17% dapat terealisasi 60,42%, persentase capaian 62,18%. Dilaksanakan dengan **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)** dengan langkah strategi peningkatan akses air minum dan akses limbah domestik melalui peningkatan pembangunan sambungan langsung rumah, peningkatan PAMSINAS dan SANIMAS, pelayanan air minum dan penanganan limbah sesuai SPM peningkatan penanganan perumahan dan kawasan kumuh melalui peningkatan jumlah perumahan rakyat yang layak huni dan tertata rapi dan berkelanjutan, peningkatan kualitas perumahan dengan PSU kawasan kumuh, pembangunan RTLH di daerah kumuh dan luar kumuh dalam rangka pencegahan kumuh, pembangunan RTLH sesuai dengan SPM.

Capaian Sasaran 15: Meningkatnya konektivitas antar wilayah

Indikator untuk mengukur sasaran ini adalah “Rasio konektivitas” dengan target 0,81 dengan realisasi 0,67 dapat tercapai 82,72%. Dilaksanakan dengan **Program Penyelenggaraan LLAJ** dengan langkah strategi meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan jaringan jalan yang memiliki trayek angkutan, peningkatan sarana prasarana perhubungan, meningkatnya kualitas perlengkapan lalu lintas, meningkatnya manajemen lalu lintas serta meningkatnya teknologi dalam smart transportasi melalui penyediaan dan peningkatan kualitas layanan transportasi seperti Bus Rapid transit dan layanan angkutan feeder pedesaan berbasis IT.

Capaian Sasaran 16: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Ada 3 indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut, sebagai berikut:

Tabel 3.16
Capaian Sasaran 16

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	54,64	68,55	120,00
	Indeks kualitas udara	73,06	75,67	103,57
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,43	58,21	120,00

(Sumber: Bapperida Kendal Tahun 2026)

Dilaksanakan dengan **Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan LH Kab/Kota, dan Program Pengelolaan Persampahan** dengan langkah strategi meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengujian kualitas air, udara, penanganan sampah, pengelolaan keanekaragaman hayati dengan RTH yang cukup dan berkualitas.

Capaian Sasaran 17: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

Indikator “Indeks Ketahanan Daerah (IKD)” ditargetkan 65 dapat terealisasi 74, persentase capaian 113,85%. Dilaksanakan dengan **Program Penanggulangan Bencana** dengan langkah strategi meningkatkan ketahanan daerah dalam penanganan bencana melalui menerapkan strategi pengurangan resiko dan

kesiapsiagaan penanganan bencana, penguatan desa tangguh bencana, peningkatan early warning sistem, dan prasarana penanganan bencana.

Capaian Sasaran 18: Meningkatnya birokrasi yang akuntabel

Indikator yang digunakan dalam pengukuran capaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Capaian Sasaran 18

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	77,55	69,79	91,79
	Kasus Korupsi	0	0	100,00
	Opini BPK	WTP	WTP	100,00

(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2025, diolah)

Dilaksanakan dengan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perekonomian Dan Pembangunan, Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**, dengan langkah strategi peningkatan birokrasi yang akuntabel melalui peningkatan kualitas perencanaan pengukuran pencapaian kinerja memperkuat kelembagaan, meningkatkan proses partisipasi dengan meningkatkan peran RT RW dalam musrenbang, pelaksanaan pembangunan, penanganan dan pencegahan korupsi, perencanaan, litbang dan peningkatan kualitas APBD Pembangunan Daerah.

Capaian Sasaran 19: Meningkatnya birokrasi yang Kapabel

Indikator yang digunakan dalam pengukuran capaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Capaian Sasaran 19

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya birokrasi yang Kapabel	Indeks Professionalisme ASN	77,78	82,42	105,97
	Indeks SPBE	3,91	3,66	93,61
	Indeks kematangan kelembagaan	32,96	38,53	116,90

(Sumber: Bapperida Kendal Tahun 2026)

Dilaksanakan dengan **Program Kepegawaian Daerah, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengembangan Sumberdaya, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, Program Penyelenggaraan Pengawasan** dengan langkah strategi meningkatkan birokrasi yang kapabel pada peningkatan profesionalisme ASN melalui peningkatan kualitas, kinerja dan kedisiplinan ASN, Peningkatan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan pembangunan berbasis elektronik, Mendorong optimalisasi E- Planning, E-Monitoring, E-Musrenbang, E-Services, E-Budgeting sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi, peningkatan kualitas satu data dan mendorong keamanan arsip daerah serta kualitas persandian. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi, Peningkatan kematangan organisasi melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas, penjaminan mutu layanan daerah, ketaatan terhadap SOP, terukurnya kinerja daerah, manajemen sumberdaya peralatan dan perlengkapan kerja, manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur, analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas, adanya pengembangan inovasi layanan dan peningkatan kualitas budaya organisasi.

Capaian Sasaran 20: Meningkatnya kualitas pelayanan Publik

Indikator yang digunakan dalam pengukuran capaian sasaran ini adalah “Nilai Rata rata IKM” dengan target 88,47 dapat terealisasi 93,78, persentase capaian 106,00%. Dilaksanakan dengan ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD*** dengan langkah strategi meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kecepatan pelayanan, mengurangi pungli, peningkatan penyelesaian pengaduan yang terintegrasi dan peningkatan sarana prasarana pelayanan.

A.5

Analisa Permasalahan dan Rekomendasi

1. Tantangan Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kendal

a. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

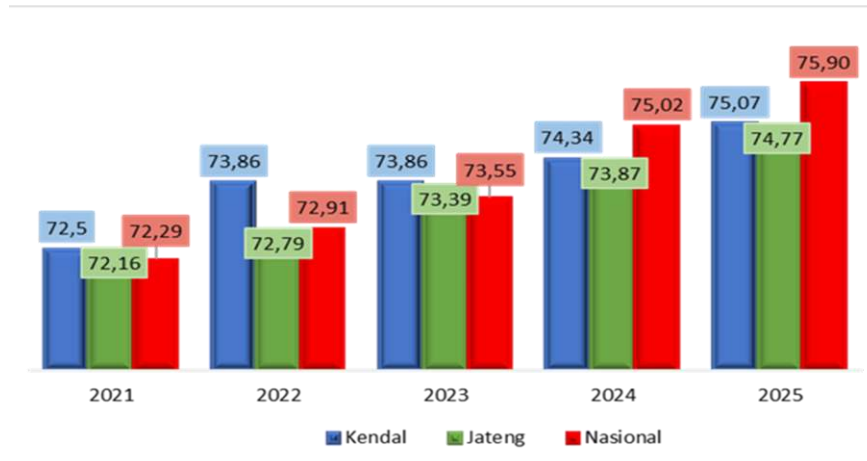
- 1) Dalam 20 tahun mendatang, Kabupaten Kendal menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2005 sebesar 905.451 jiwa dengan laju pertumbuhan 0.18% diperkirakan meningkat mencapai sekitar 1.093.675 jiwa pada Tahun 2025. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. Meskipun demikian, pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, penyebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi.
- 2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kendal yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian Kabupaten Kendal. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi, antara lain, adalah:

- a. mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, tingkat sosial ekonomi, dan gender;
- b. meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai;
- c. meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan
- d. mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular.

Namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, dan antar jenis kelamin. Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, antar jenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan Kabupaten Kendal secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta meningkatkan daya saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan kondisi demografi.

Grafik 3.11
Indeks Pembangunan Manusia



(Sumber: Bapperida Kendal Tahun 2026)

Grafik 3.12
Angka Harapan Hidup Kabupaten Kendal



(Sumber: Bapperida Kendal Tahun 2026)

Grafik 3.13
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal



(Sumber: Bapperida Kendal Tahun 2026)

3) Kualitas hidup dan peran perempuan serta anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah. Hal itu, antara lain, ditandai oleh :

- a. tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; dan
- b. kurang memadainya kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak.

Dengan demikian, tantangan di bidang pembangunan perempuan dan anak adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sementara itu, tantangan di bidang pemuda dan olahraga adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan budaya dan prestasi olah raga. Tantangan lainnya adalah menurunkan beban permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial, seperti :

- a) menipisnya nilai budaya dan agama;
 - b) menurunkan ekses dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat dan terjadinya bencana sosial dan bencana alam; dan
 - c) meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat.
- 4) Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan Kabupaten Kendal untuk dapat mempertahankan jati diri masyarakat ketimuran yang berpegang pada norma dan kesopanan, dan sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan agama serta peningkatan daya saing melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan penyerapan nilai-nilai universal.
- 5) Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan.

- 6) Proses pelayanan sosial harus disertai upaya menggali potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada dalam masyarakat. Masih ada permasalahan sosial yang belum terjangkau karena keterbatasan kemampuan pemerintah.

b. Ekonomi

- 1) Pembangunan ekonomi sampai saat ini, meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, masih jauh dari cita-cita untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, tantangan besar kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekurang-kurangnya 4% per tahun dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari daerah–daerah lain yang lebih maju.
- 2) Percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Banyak usaha mikro yang terdampak dengan adanya penerapan PSBB dan PPKM.
- 3) Secara eksternal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi persaingan ekonomi antardaerah yang makin tinggi akibat makin pesat dan meluasnya proses globalisasi. Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber-sumber daya alam tak terbarukan. Untuk masa depan perlu diubah menjadi perekonomian yang produk-produknya mengandalkan keterampilan SDM serta mengandalkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing nasional sehingga ekspor bahan mentah dapat dikurangi kemudian digantikan dengan ekspor produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global.
- 4) Secara internal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi pertumbuhan penduduk Kabupaten Kendal. Dalam angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat jumlahnya dari kondisi saat ini. Dengan komposisi pendidikan angkatan kerja yang pada tahun 2004 sekitar 50 persen lebih berpendidikan setingkat SD, dalam 20 tahun ke depan komposisi pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang

berpendidikan setingkat SMP sampai dengan SMU. Dengan demikian, kapasitas perekonomian pada masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang agar mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang layak.

- 5) Tantangan internal yang penting lainnya adalah terlalu teraglomerasinya aktivitas perekonomian di daerah perkotaan yang melebihi daya dukung optimal lingkungan hidupnya. Pada masa yang akan datang, perekonomian juga dituntut untuk mampu berkembang secara lebih proporsional di seluruh wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan. Selain akan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan lingkungan, hal tersebut juga akan berguna untuk memperkuat perekonomian daerah yang ditunjukkan oleh diversifikasi perekonomian sekaligus perbaikan di dalam kesempatan kerja dan berusaha sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
- 6) Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu daerah di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankan kekuatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. Dengan pemahaman itu, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam daerah.
- 7) Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pada semua pemangku kepentingan dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan

keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin. Padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Persaingan yang semakin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi perkembangan menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan kemajuan IPTEK, tantangan yang dihadapi adalah :

- 1) meningkatkan kontribusi IPTEK untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup masyarakat;
- 2) menciptakan rasa aman;
- 3) memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dan pangan;
- 4) memperkuat sinergi kebijakan IPTEK dengan kebijakan sektor lain;
- 5) mengembangkan budaya IPTEK di kalangan masyarakat;
- 6) meningkatkan komitmen daerah terhadap pengembangan IPTEK;
- 7) mengatasi degradasi fungsi lingkungan;
- 8) mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; dan
- 9) meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya IPTEK, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan IPTEK.

d. Sarana dan Prasarana

- 1) Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan menghadapi tantangan utama, yaitu meningkatkan pasokan air baku yang ditempuh melalui pengembangan prasarana penampung air yang dapat dikelola bersama oleh masyarakat. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air harus mampu mengantisipasi perkembangan daerah-daerah permukiman dan industri baru. Intervensi sarana dan prasarana juga perlu dilakukan untuk mengurangi laju sedimentasi sejalan dengan upaya-upaya konservasi dan reboisasi terutama dengan mengembangkan bangunan-bangunan pengendali sedimen yang

dapat dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan jaringan irigasi belum diselenggarakan dengan pengutamaan peran masyarakat petani dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pihak pengguna air irigasi. Peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus terus dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu (integrated water resources management). Upaya mempertahankan kondisi kualitas air yang ada serta pemulihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi.

- 2) Tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu serta selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya masyarakat. Tantangan utama dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya agar dapat melaksanakan pembangunan transportasi daerah adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraturan yang kondusif, meningkatkan iklim kompetisi yang sehat, meningkatkan peran serta pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan transportasi publik, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.
- 3) Globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat untuk mendapatkan akses informasi menuntut adanya penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan pembangunan pos dan telematika. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara pendidikan dengan teknologi informasi serta sektor-sektor strategis lainnya. Walaupun pembangunan pos dan telematika saat ini telah mengalami berbagai kemajuan, informasi masih merupakan barang yang dianggap mewah dan hanya dapat diakses dan dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana teknologi informasi komunikasi tersebut dapat diterima masyarakat sesuai dengan pendidikan dan etika moral. Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi adalah meningkatkan

keandalan pasokan energi, sarana dan prasarana, serta proses penyalurannya untuk keperluan masyarakat karena belum ada kebijakan tarif lokal untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis energi serta sarana dan prasarananya.

- 4) Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, adalah :
 - a. melakukan reformasi, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang, sebagai upaya untuk menekan dan mengurangi harga rumah sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat;
 - b. mendorong adanya insentif perpajakan kepada dunia usaha agar berpartisipasi secara langsung dalam penyediaan perumahan; dan
 - c. melakukan penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah melalui pemberian fasilitas kredit mikro perumahan, fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat yang berswadaya dalam pembangunan rumah.

Dengan demikian, penyediaan perumahan dapat diselenggarakan dengan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, melainkan juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

- 5) Dengan makin terbatasnya sumber dana yang dapat dimobilisasi oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana, anggaran akan lebih difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang secara ekonomi dan sosial bermanfaat, tetapi secara finansial kurang layak. Untuk proyek sarana dan prasarana yang layak secara finansial akan dibangun dengan memanfaatkan dana-dana masyarakat dan membuka peluang kerja sama dengan badan usaha, terutama swasta dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana. Hal itu, merupakan tantangan yang menuntut dilakukannya berbagai penyempurnaan aturan main, terutama berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta pentingnya reformasi di sektor keuangan guna memfasilitasi kebutuhan akan dana-dana jangka panjang masyarakat yang tersimpan di berbagai lembaga keuangan.

e. Politik

- 1) Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dalam pembangunan politik adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan yang akan dihadapi adalah mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai.
- 2) Konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Kendal. Tantangan utamanya adalah meneguhkan kembali makna penting persatuan nasional dengan memperhatikan berbagai keanekaragaman latar belakang dan kondisi. Hal itu meliputi aspek desentralisasi dan keadilan sosial. Terkait dengan telah dirumuskannya format hubungan pusat dan daerah yang baru, tantangan ke depan adalah menciptakan hubungan pusat dengan daerah yang benar-benar mampu memadukan kepentingan dalam upaya memperkuat ikatan NKRI dan tetap menjaga berkembangnya iklim demokrasi hingga ke tingkat lokal atau dinamika di berbagai daerah.
- 3) Tantangan lain untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunya mereformasi birokrasi sipil. Konsolidasi demokrasi memerlukan pelaksana kebijakan yang reformis di dalam pemerintahan dan memerlukan dukungan birokrasi yang memenuhi syarat profesionalisme, kredibilitas dan kapasitas, serta efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, salah satu tantangan demokrasi terbesar adalah masih belum kuatnya masyarakat sipil, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Oleh karena itu, dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan, pendidikan politik akan merupakan alat transformasi sosial menuju demokrasi. Masyarakat sipil yang kuat sangat tergantung kepada kapasitas masyarakat dalam merespon dan memahami dinamika pasar global dan pasar dalam negeri serta saling berinteraksi antara negara, masyarakat sipil, dan pasar dalam mewujudkan negara yang demokratis. Tantangan lain untuk menjaga proses konsolidasi demokrasi adalah mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan

menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan pemerintah daerah secara profesional.

- 4) Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada tantangan bagaimana melembagakan kebebasan pers/media massa. Akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, dalam banyak hal, akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik. Peran media massa yang bebas sangat menentukan dalam proses menemukan, mencegah, mempublikasikan berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan dan korupsi. Tantangan lain adalah mengatasi berbagai dampak negatif perkembangan industri pers yang cenderung berpihak pada kepentingan kapitalis dan bukan mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Keseluruhan upaya tersebut berada dalam konteks menempatkan peranan pers sebagai salah satu pilar dari perkembangan demokrasi.

f. Hukum dan Aparatur

- 1) Tantangan ke depan di dalam mewujudkan tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran merupakan syarat mutlak dalam upaya penciptaan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kendal.
- 2) Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan belum terselesaikan. Permasalahan itu makin meningkat kompleksitasnya seiring dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, dan revolusi teknologi informasi.
- 3) Proses demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara termasuk pengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur negara tidak dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik. Globalisasi membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi Industri 4.0, meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi (TI), meningkatkan perubahan manajemen pemerintahan. Pemanfaatan TI dalam bentuk satu data daerah, e-government, e-

procurement, ebusiness dan cyber law selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pandemi Covid-19 telah memacu penyelenggaraan pemerintahan daerah (termasuk Pendidikan dan pelayanan publik) memanfaatkan TI dan tatanan baru dalam kesehatan dan mobilitas penduduk internal Kabupaten Kendal dan antar daerah.

g. Wilayah dan Tata Ruang

- 1) Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan dan pemanfaatan lahan tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang yang baik diperlukan bagi :
 - a. arahan lokasi kegiatan;
 - b. batasan kemampuan lahan, termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam; dan
 - c. efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan.

Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang yang searah, dalam arti tidak saling bertabrakan antar sektor, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana.

- 2) Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah perdesaan dan perkotaan perlu dilakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kendal. Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah bukan untuk pemeratakan pembangunan fisiknya, tetapi untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di masing-masing desa / kelurahan maupun kota. Dalam kaitan itu, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan sumber daya alam yang ada selama ini dan belum optimal sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Kendal.

h. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- 1) Dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada tiga ancaman, yaitu krisis pangan, krisis air, dan krisis kesehatan. Ketiga krisis itu menjadi tantangan Kabupaten Kendal jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Kendal, yaitu terancamnya moral masyarakat, meningkatnya semangat separatisme, dan menurunnya kesehatan masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu, praktik pertanian konvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian. Di lain pihak, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian.
- 2) Meningkatnya luasan lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Hal ini akan menjadikan krisis lahan yang berarti bahwa kebutuhan akan lahan baik untuk aktivitas budidaya maupun untuk aktivitas lindung tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Pada sisi yang lain, terjadinya kerusakan fisik pada ekosistem pesisir dan laut yang berupa deforestasi hutan mangrove dan degradasi terumbu karang juga menyebabkan hilangnya potensi pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir. Kasus pencemaran lingkungan yang semakin meningkat, hal ini diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri, pertanian, dan rumah tangga memberi dampak negatif yang mengakibatkan

terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun mendatang, sehingga memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari selain upaya ke arah pematenan (hak atas kekayaan intelektual/HAKI). Oleh karena itu, penyelamatan ekosistem beserta flora-fauna di dalamnya menjadi bagian integral dalam pembangunan Kabupaten Kendal yang berdaya saing.

B

REALISASI ANGGARAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Kendal tahun 2025 menurut urusan Pemerintahan Daerah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 3.19

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target dan Kinerja APBD Kabupaten Kendal Tahun 2025 Dan 2024

Belanja Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	%
PENDAPATAN			
- PAD	701.763.507.059,00	517.108.168.048,00	135,71%
- Pendapatan Transfer	1.874.729.960.015,00	2.000.652.665.954,00	93,71%
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0%
JUMLAH PENDAPATAN	2.576.493.467.074,00	2.517.760.834.002,00	102,33%
BELANJA			

- Belanja Operasi	1.934.004.193.480,00	2.000.107.920.722,00	96,69%
- Belanja Modal	195.487.215.581,00	212.877.821.607,00	91,83%
- Belanja Tak Terduga	3.641.132.725,00	2.989.866.000,00	121,78%
- Belanja Transfer	341.859.758.656,00	410.152.660.564,00	83,35%
JUMLAH BELANJA	2.474.992.300.442,00	2.626.128.268.893,00	94,24%
SURPLUS/DEFISIT	101.501.166.632,00	(108.367.436.790,00)	
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
- Penggunaan SILPA	29.769.947.586,56	103.129.382.477,56	21,57%
- Pencairan Dana Cadangan	0,00	35.000.000.000,00	
- Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	21.777.500,00	8.000.000,00	272,22%
- Penerimaan Piutang Daerah			
Jumlah Penerimaan	29.791.725.086,56	138.137.382.477,56	21,57%
Pengeluaran Pembiayaan			
- Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
- Penyertaan Modal Pemda	0,00	0,00	0,00
- Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	29.791.725.086,56	138.137.382.477,56	21,57%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	131.292.891.718,5	29.769.947.586,56	441,02%

(Sumber: BPKAD Kabupaten Kendal Unaudited BPK RI Tahun 2025)

2. Hambatan dan solusi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Realisasi target pendapatan daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperoleh solusi atas permasalahan sesuai dengan

kemampuan sumber daya yang tersedia. Permasalahan eksternal antara lain kurangnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak/ retribusi, potensi pendapatan dari pemerintah pusat maupun provinsi yang belum optimal pemanfaatannya, kurang koordinasi terkait pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat waktu, sehingga pencairan dana transfer yang didasarkan progres pekerjaan tidak tercairkan. Adapun permasalahan internal pengelolaan pendapatan antara lain kurang tertibnya administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan daerah dalam mendukung PAD. Untuk melaksanakan amanat RPJMD yaitu adanya peningkatan target PAD terutama sektor pajak daerah, beberapa upaya dalam rangka pencapaian dan peningkatan realisasi target pendapatan telah dilakukan yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi khususnya peningkatan PAD dengan kegiatan yang dilaksanakan secara simultan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan, penagihan kepada wajib pajak dan retribusi daerah melalui penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan dan penggunaan sistem informasi untuk lebih memudahkan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat wajib pajak/retribusi.
2. Terus memperbaiki sistem dan alur digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui penyempurnaan fitur dan kerjasama baik dengan lembaga keuangan maupun dengan non bank.
3. Penyelenggaraan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang menjamin bahwa setiap pendapatan yang menjadi hak daerah sudah ditetapkan, dipungut/dikenakan, dicatat, disetorkan ke Kas Daerah dalam jumlah yang benar dan tepat waktu.
4. Sosialisasi/penyuluhan kepada wajib pajak/retribusi dan penerapan self assessment serta penegakan disiplin pengelolaan pajak dengan penagihan aktif oleh petugas pajak serta penindakan atas pelanggaran perda.
5. Mengupayakan ketersediaan data pendapatan, analisis serta perhitungan penerimaan pajak dan retribusi sesuai dengan potensi yang akurat serta merencanakan target sesuai dengan potensi riil, sesuai kajian potensi pendapatan yang rasional dan terukur serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

6. Peningkatan koordinasi antara pengelola pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan dukungan dari lintas SKPD.
7. Pendekatan pelayanan dengan menambah tempat pembayaran serta pelayanan jemput bola dengan menjalin kerjasama dengan BPD Jawa Tengah.
8. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pencairan dana transfer.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja antara lain tidak optimalnya realisasi anggaran Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga, adanya pegawai yang berakhir masa kerjanya (pensiun) sehingga anggaran belanja pegawai, tunjangan penghasilan yang tidak optimal terserap, biaya pemungutan PBB, insentif pengelolaan pajak dan retribusi. Adapun permasalahan internal antara lain proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat pelaksanaannya sehingga pekerjaan fisik tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, disamping itu juga ada efisiensi/penghematan belanja, antara lain dengan pelaksanaan lelang dengan nilai kontrak di bawah pagu anggaran dan atau pembelian barang dan jasa di bawah harga standar harga/kegiatan. Solusi yang dilakukan terkait dengan perencanaan belanja daerah Tahun 2025 antara lain:

1. Perlunya perencanaan kegiatan yang lebih baik serta proses perencanaan dan pengadaan barang/jasa dilaksanakan lebih awal.
2. Perlunya pemantauan progres kegiatan, bila lambat/tidak sesuai jadwal perlu penyelesaian masalahnya dan percepatan kegiatan tersebut, juga pencermatan bila ada kegiatan yang tidak sesuai atau diperkirakan tidak bisa dilaksanakan segera diambil solusi penyelesaiannya.
3. Penyelesaian program dan kegiatan dilaksanakan secara bertahap dengan memanfaatkan sumber dana yang tersedia secara efektif dan selektif karena pendapatan APBD Kabupaten Kendal masih sangat tergantung pada dana perimbangan, dana pemerintah lainnya, serta bantuan keuangan Pemerintah Provinsi.
4. Perlunya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan Kementerian terkait agar terwujud harmonisasi pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan maupun perencanaannya di tahun selanjutnya.

5. Beban belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang cukup tinggi telah diupayakan bisa terpenuhi secara keseluruhan sehingga tidak menimbulkan beban yang lebih berat pada tahun berikutnya.
6. Memenuhi prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait dengan memperhatikan prioritas nasional, regional, dan daerah.

BAB IV

PENUTUP

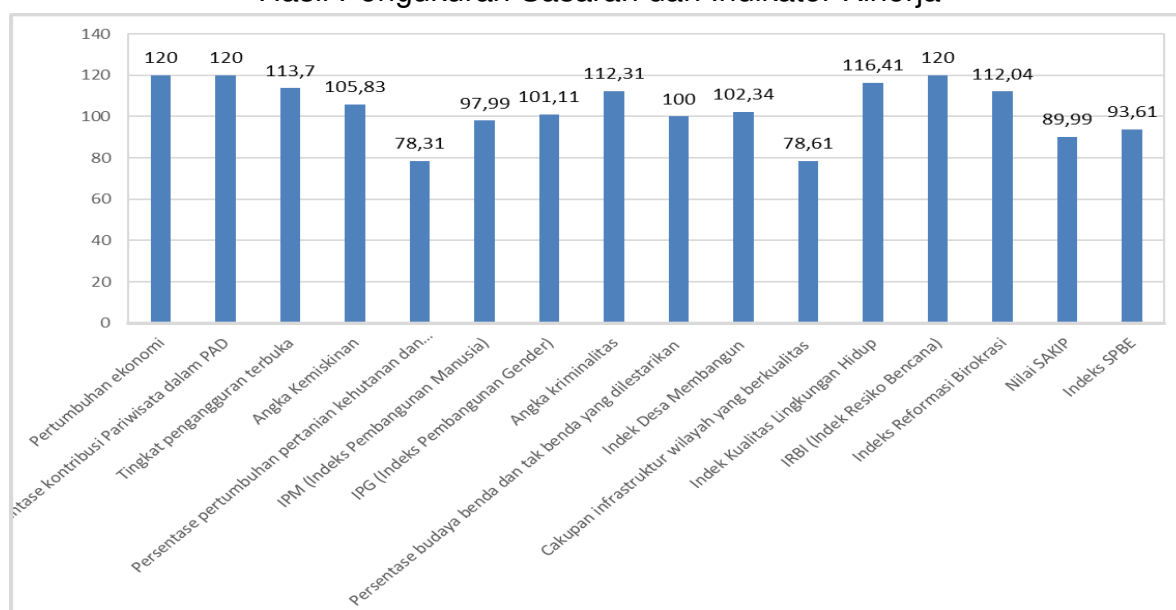
A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil pengukuran pada 20 (dua puluh) sasaran, dengan 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja (outcomes) yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kendal dan kontribusinya terhadap capaian visi dan misi daerah pada tahun 2025, sebagai berikut :

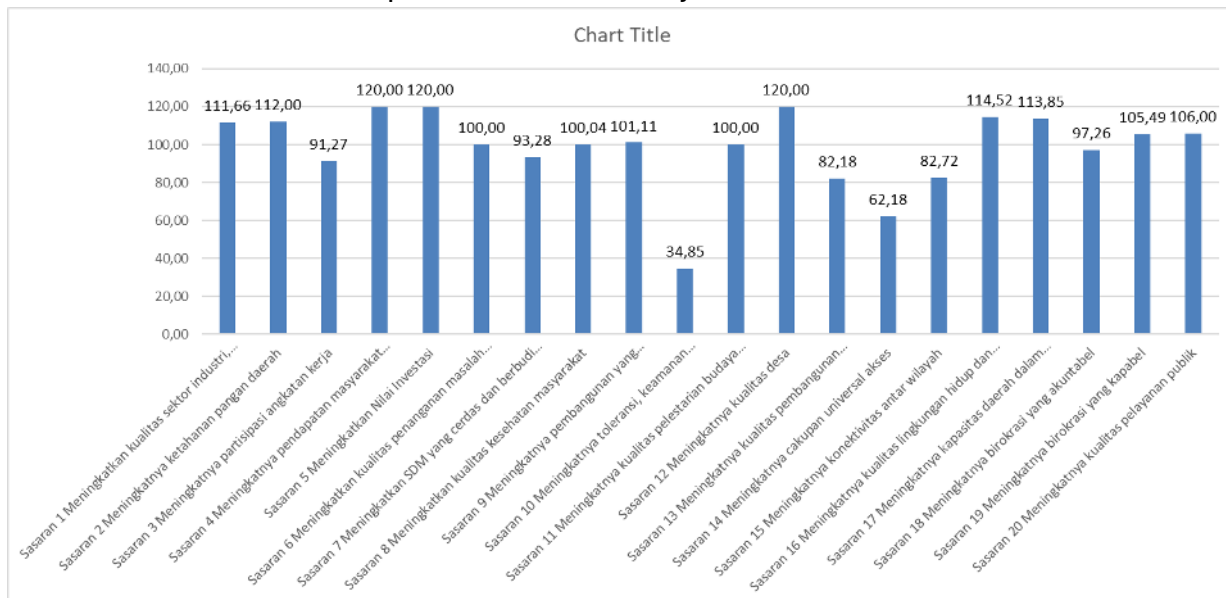
Grafik 4.1
Hasil Pengukuran Sasaran dan Indikator Kinerja



(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2025, diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran seluruh sasaran (100%) telah dapat direalisasikan dengan Baik dengan rata-rata capaian kinerja 97,89%. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Grafik 4.2
Capaian Indikator Kinerja Persasaran



(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2025, diolah)

Tabel 4.1
Jumlah Indikator Tiap / Per Sasaran Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1	Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah	5 indikator
2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1 indikator
3	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	1 indikator
4	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM	1 indikator
5	Meningkatnya nilai investasi	1 indikator
6	Meningkatnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	1 indikator
7	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur	2 indikator
8	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 indikator
9	Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender	1 indikator
10	Meningkatnya toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	2 indikator
11	Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya	2 indikator
12	Meningkatnya kualitas desa	1 indikator

No	Sasaran	Jumlah Indikator
13	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	4 indikator
14	Meningkatnya cakupan universal akses	1 indikator
15	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1 indikator
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3 indikator
17	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1 indikator
18	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	3 indikator
19	Meningkatnya birokrasi yang Kapabel	3 indikator
20	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1 indikator

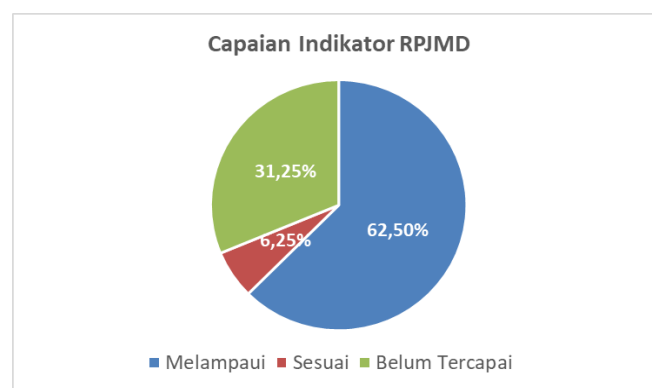
(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2025, diolah)

Dengan demikian pada tahun 2025 rata-rata capaian kinerjanya 97,89%. jika disandingkan dengan target akhir RPJMD masih terdapat 5 (Lima) indikator kinerja atau 31,25% yang belum tercapai, sehingga diperlukan perhatian lebih pada tahun-tahun berikutnya, indikator kinerja tersebut yaitu:

1. Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB.
2. IPM (Indeks Pembangunan Manusia).
3. Cakupan infrastruktur wilayah yang berkualitas.
4. Nilai SAKIP.
5. Indeks SPBE.

Capaian indikator tersebut pada tahun 2025 lebih dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi, dan beberapa regulasi terdapat perubahan target, parameter, dalam implementasi dan pengukurannya.

Grafik 4.3
Capaian Indikator RPJMD



(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal 2025, diolah)

Untuk menyikapi permasalahan tersebut upaya yang ditempuh adalah meningkatkan koordinasi perencanaan kinerja antar instansi terkait dalam bidang tersebut, melibatkan peran serta aktif dari unsur kewilayahan dalam pengelolaan sarana prasarana, dan sarana penunjang lainnya, terutama yang berada di lingkungan sekitarnya dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan komunikasi untuk bersama-sama dalam membangun sektor tersebut serta tetap memelihara dan menjaga lingkungan terutama sarana prasarana umum, yang memiliki fungsi ekologi, sosial ekonomi dan estetika.

Dalam Tahun Anggaran 2025, untuk pencapaian kinerja 20 (Dua puluh) sasaran strategis dan 36 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kabupaten Kendal yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Kantor, serta Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.627.087.956.238,00. dan Realisasi senilai Rp.2.576.493.467.074,00 atau 98,70%. Belanja TA 2025 mengalami penurunan Rp.151.135.968.451,00 atau 6,11% dari Realisasi TA 2024 senilai Rp.2.626.128.268.893,00.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja tahun 2025 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026, dan khususnya untuk tahun 2025 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Kendal Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaikinya pada tahun-tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kendal ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kendal.

B. Strategi Peningkatan Kinerja dan Rekomendasi

Dari analisis yang dilakukan ditemukan beberapa kelemahan dan tantangan yang dapat dipedomani untuk perencanaan kinerja pembangunan ke depan.

Berikut analisis SWOT yang dilakukan untuk meningkatkan Kinerja dan Rekomendasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal:

a. *Strengths* (Kekuatan)

1. Adanya regulasi yang jelas (APBD/APBN, Permendagri, SOP keuangan).
2. Sistem digital untuk Penyelerasan Anggaran seperti SIPD / SIMDA / *e-budgeting*.
3. Mekanisme pengawasan berlapis (Inspektorat, BPK).
4. Komitmen pemerintah daerah terhadap Reformasi Birokrasi & SAKIP.
5. Perencanaan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*).
6. Pertumbuhan sektor industri dan investasi relatif tinggi.
7. Potensi sektor unggulan: industri, pertanian, dan pariwisata.

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

1. Keterlambatan penyerapan anggaran (menumpuk di akhir tahun).
2. Kualitas SDM belum merata (pendidikan & keterampilan tenaga kerja).
3. Ketepatan waktu penyerapan pajak yang lambat.
4. Perencanaan belum sepenuhnya berbasis data dan *outcome*.

c. *Opportunities* (Peluang)

1. Dukungan transformasi digital (*e-government, e-budgeting*).
2. Kebijakan pusat mendorong efisiensi & akuntabilitas (SAKIP, SPBE).
3. Dukungan kebijakan pusat (hilirisasi industri, penguatan UMKM).
4. Integrasi sistem data dan dashboard kinerja *real-time*.
5. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM.
6. Partisipasi publik dalam pengawasan anggaran.
7. Masuknya investasi nasional & asing (terutama kawasan industri Kendal).

d. *Threats* (Ancaman)

1. Perubahan regulasi yang cepat.
2. Fluktuasi ekonomi global/nasional.
3. Ketidakstabilan ekonomi (*refocusing* anggaran).

4. Risiko pengangguran jika SDM lokal tidak terserap.

Strategi yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya/teknologi dalam pengelolaan data secara terpadu dan sistematis.
2. Integrasi sistem perencanaan berbasis digital dan data.
3. Meningkatkan penguatan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kendal.
4. Optimalisasi pemanfaatan informasi kinerja hingga ke seluruh pimpinan Perangkat Daerah beserta jajarannya.
5. Meningkatkan daya saing investasi melalui kemudahan perizinan & regulasi.
6. Mengembangkan potensi sumberdaya yang tersedia secara lebih optimal.
7. Memastikan pemanfaatan rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebagai *guide* untuk perencanaan ke depan.
8. Meningkatkan perencanaan berbasis data (*evidence-based planning*).
9. Optimalisasi kawasan industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.



Kendal, Maret 2026

BURAT KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI, SE., M.M.

LAMPIRAN

Sinergitas dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal bersama DPRD Kabupaten Kendal yang didukung *Stakeholder* terkait telah menunjukkan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kendal dalam upaya menyejahterakan masyarakat, sehingga Pemerintah Kabupaten Kendal meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama sembilan tahun berturut turut dari tahun 2016 sampai dengan 2024, dan kita semua berharap pada tahun 2025 yang saat ini penilaiannya masih dilaksanakan oleh BPK RI akan dapat mempertahankan capaian WTP tersebut.

Selanjutnya beberapa keberhasilan pada tahun 2025 ini telah banyak kita capai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Kendal, hal tersebut kita torehkan dengan penghargaan-penghargaan dari berbagai pihak antara lain :

1. Pesantren Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia.



2. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



3. WTP 9 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
4. KIP Award 3 tahun berturut-turut Kategori Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

5. Penghargaan Indeks pelayanan Publik kategori sangat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi.



6. *Helpdesk* Terbaik Aplikasi Srikandi dari Arsip Nasional Republik Indonesia.
7. Hasil Pengawasan Kearsipan Kategori A dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia kategori kualitas tertinggi.

9. Kabupaten Layak Anak Predikat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.



10. Taman Asuh Ramah Anak Predikat Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

11. Baznas Award Kategori Kelembagaan Terbaik dari Baznas Republik Indonesia.



12. Tim Pengelola Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat dengan *Sharing Activity* Terbaik Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Provinsi Jawa Tengah.

13. Penghargaan Cipta Istakarya Nusantara dari Organisasi Wanita Muslimah Indonesia.



14. Penghargaan *Stand* Terbaik Pameran Virtual Kearsipan Juara Harapan III dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

15. Penganugerahan Piagam Penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHA) dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

16. Pemerintah Kabupaten / Kota dengan Capaian Nilai Realisasi Investasi Tertinggi Tingkat Jawa Tengah dari Gubernur Jawa Tengah.

